

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN  
AGLOMERASI PADA KORIDOR PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 1997-2003**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

242/03  
K  
2



**DIAJUKAN OLEH**

**KRISNA ANGGAKORO**

**No. Pokok : 040117107**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**SKRIPSI**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN  
AGLOMERASI PADA KORIDOR PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 1997-2003**

**DIAJUKAN OLEH:**

**KRISNA ANGGAKORO  
No. Pokok 040117107**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**NURUL ISTIFADAH, S.E., M.Si.**

Tanggal..... *13 Juni 2006*

**KETUA PROGRAM STUDI,**



**Dra.Ec. Sri Kusreni, Msi**

Tanggal..... *15 Juni 2006*

## Kata Pengantar

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya atas segala rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Dan Aglomerasi Pada Koridor Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003 sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Airlangga.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak secara moril, materiil, maupun spirituil oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Bapak Drs.Ec. Karyadi Mintaroem, M.S.
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Ibu Dra.Ec. Hj. Sri Kusreni, M.Si.
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Ibu Dra.Ec. Hj. Siti Umajah.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Nurul Istifadah. SE. M.Si atas pengarahan dan tambahan ilmunya terhadap skripsi ini.

5. Orang Tua Penulis, Ardi Gunung Sunyoto dan Tatik Dwi Hartini, yang telah membimbing, mengarahkan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Semua Dosen Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna.
7. Staf jurusan dan staf akademik yang telah membantu mengenai administrasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Adik penulis, Dewanggini Laras, yang telah mendukung penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini..
9. Semua Staf Ruang Baca Fakultas Ekonomi Airlangga dan Staf Ruang Baca BPS Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar “Mustika” di Simo (Bu Endah, Ewin, Mbak Ninis, Minot, Aries Papa, Kendrew, Danang)
11. Rekan-rekan Jurusan SP'01, Ervan, Iqbal, Enroe, Awang, Arie, Kiki, Wahyu, Kikin, Prayit, Agus, Ucup, Dodo, Ali, Doni S, Doni G, Hari, Zaenal, Tatag, Fauzan, Andri, Rendra, Retno, Rahma, Nera, Tima, Mukti, Ratih, Refina, Ela, Nia, Tika, Diah, Mila.
12. Rekan-rekan Jurusan SP lainnya, Tata (atas tutorial dan saran-sarannya), Iqbal, Taufik, Ribut, Lukman, Hendra'99, Aswin, Diki, Arga, Wedyo, Wendy, Doni, Hape, Wirya, Soni, Erlangga, Maria, Yeni, Happy, Fidyah, Ika, Pakde Nada, Wahyu, Rama.

### Abstrak

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Perkonomian Jawa Timur mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional baik di bidang perdagangan, industri pengolahan maupun penghasil bahan pangan. Proses pembangunan ekonomi telah memberikan hasil-hasil positif bagi perekonomian Jawa Timur. Namun di sisi lain, proses pembangunan ekonomi ternyata telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar baik dalam bentuk ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota.

Skripsi ini menganalisis (1) ketimpangan pembangunan ekonomi dan aglomerasi yang terjadi pada koridor pembangunan Jawa Timur tahun 1997-2003. (2) mengetahui besarnya tingkat ketimpangan pembangunan antar kab/kota dalam koridor dan antar koridor, dan (3) mengetahui bagaimana proses aglomerasi di setiap koridor di Jawa Timur. Perhitungan dalam skripsi ini menggunakan Indeks Theil, Indeks Herfindahl dan Indeks Krugman. Indeks Theil digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan. Pengukuran dengan Indeks Theil dibagi menjadi dua komponen yaitu dalam koridor dan antar koridor. Sedangkan Indeks Herfindahl dan Indeks Krugman digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi aktifitas ekonomi.

Hasil perhitungan indeks Theil menunjukkan bahwa nilai ketimpangan total Jawa Timur berada pada tingkatan yang cukup rendah. Ketimpangan total Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh ketimpangan dalam koridor terutama yang terjadi pada koridor Barat Daya. Sedangkan ketimpangan antar koridor menunjukkan nilai yang rendah tetapi mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Nilai Indeks Herfindahl dan Indeks Krugman menunjukkan bahwa aktifitas perekonomian Jawa Timur terkonsentrasi di koridor Utara-Selatan. Kecenderungan pemusatan aktifitas ekonomi tersebut dipengaruhi oleh keuntungan lokasional yang berupa penghematan biaya transpor, kedekatan dengan akses pasar, kemudahan akses teknologi dan informasi, kemudahan *supply* dari tenaga kerja terampil serta keuntungan lainnya yang dapat ditemui di koridor Utara-Selatan.

*Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan Ekonomi, Aglomerasi, Koridor, Jawa Timur .*

### **Abstract**

East Java is one of Indonesia province which has largest amount of citizen. East Java economy has a significant role for national economy such as trade, manufacturing industries and food producers. The economy development process has been give many positive results for East Java economy. In other hand, this process have already created a lot of inequality such as income inequality or regional inequality among cities.

This thesis purposes are to analyse (1) regional inequality and agglomeration which happened in East Java corridors at 1997 – 2003. (2) regional inequality among cities and agglomeration which happened in East Java corridors. (3) measuring the agglomeration in each corridor in East Java. This thesis using Theil Index to measure the regional inequality. This measures divide in two components which are within corridors and between corridors. While Herfindahl Index and Krugman Index use to measure the economy activities concentration.

The Theil Index results show that inequality in East Java is quite low. Inequality in East Java influenced by within corridors inequality especially which occurred from Southwest corridor. While between corridors inequality shows that this inequality is in low level but has tendency to increase. The Herfindahl and Krugman Index measurements show that East Java economy activities has been concentrate in North-South corridors. This concentration tendency is influenced by localization economies like reduction of transportation cost, close to the market access, the ease for technology and information access, efficiency in the job market and many other profit can be found in North – South corridor.

Key word : Regional inequality, Agglomeration, Corridors, East Java.

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. <i>Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi</i> .....	11
2.1.2. <i>Pembangunan Ekonomi Daerah</i> .....	15
2.1.3. <i>Disparitas Regional</i> .....	17
2.1.4. <i>Konsep Tentang Aglomerasi</i> .....	22
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	25
2.3. Model Analisis.....	27

2.3.1. Metode Pengukuran Ketimpangan Dalam Koridor.....	27
2.3.2. Metode Pengukuran Ketimpangan Antar Koridor.....	28
2.3.3. Metode Pengukuran Aglomerasi.....	29
2.3.3.1 Metode Pengukuran Aglomerasi Herfindahl.....	29
2.3.3.2 Metode Pengukuran Aglomerasi Krugman.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	32
3.2 Identifikasi Variabel .....	32
3.3 Definisi Operasional.....	32
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	34
3.6. Teknik analisis.....	34
3.6.1. Indeks Entropi Theil Dalam Koridor.....	35
3.6.2. Indeks Entropi Theil Antar Koridor.....	36
3.6.3. Metode Pengukuran Aglomerasi.....	37
3.6.3.1 Indeks Herfindahl.....	37
3.6.3.2 Indeks Krugman.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur.....	40
4.1.1. Kondisi Geografis .....	40
4.1.2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	42
4.1.3. Kondisi Perekonomian.....	46
4.2. Hasil Perhitungan.....	49
4.2.1. Tingkat Ketimpangan Dalam Koridor.....	49
4.2.2. Tingkat Ketimpangan Antar Koridor.....	51
4.2.3. Pengukuran Aglomerasi.....	53
4.3. Analisis Hasil Perhitungan.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>



5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**Daftar Tabel**

Tabel 1.1 PDRB Jawa Timur Menurut Koridor Atas dasar harga konstan 1993 Tahun 1997-2003.....	7
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 1997, 1999, 2001, 2003.....	44
Tabel 4.2 PDRB Dan Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003.....	46
Tabel 4.3 Kontribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003 Berdasarkan Kab/Kota Tahun 1997, 1999, 2001, 2003.....	47
Tabel 4.4 PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2003.....	48
Tabel 4.5 Nilai Ketimpangan Dalam Koridor Jawa Timur Tahun 1997-2003.....	50
Tabel 4.6 Nilai Indeks Herfindahl Menurut Koridor Provinsi Jawa Timur Tahun 1997, 1999, 2001, 2003.....	54
Tabel 4.7 Nilai Indeks Krugman Menurut Koridor Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003.....	56
Tabel 4.8 Delapan Kabupaten/Kota Dengan Nilai Indeks Herfindahl Tertinggi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1997, 1999, 2001, 2003.....	61

## Daftar Gambar

Gambar 4.1 Nilai Indeks Theil Total Jawa Timur Tahun 1997-2003.....	52
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh negeri.

Di banyak negara terutama negara sedang berkembang pelaksanaan pembangunan dititik-beratkan pada bidang ekonomi. Meningkatnya hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi berdampak pada tersedianya sumber-sumber pembangunan sehingga kemampuan untuk membiayai pembangunan menjadi lebih besar dan pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi memiliki beberapa karakteristik, yaitu : (1) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, (2) usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang, (4) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari aspek perbaikan organisasi maupun perbaikan di bidang regulasi (Arsyad, 1999 : 6). Dengan demikian, pembangunan

ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Proses pembangunan di seluruh lapisan masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000 : 24):

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi peningkatan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural kemanusiaan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan tidak hanya hubungannya dengan orang-orang dan negara lain tetapi juga dengan kebodohan dan penderitaan kemiskinan.

Proses pembangunan di Indonesia pada dasarnya dapat dikaji melalui dua pendekatan. Pertama, pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha. Kedua,

pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan daerah-daerah yang menghasilkan pendapatan nasional (Esmara, 2005 : 436).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa yang berasal lebih dari 300 suku yang tersebar di seluruh kepulauan. Ada 15 ribu pulau dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua sebagai pulau utama yang terbagi menjadi 32 propinsi dan lebih dari 400 kotamadya dan kabupaten (Resosudarmo dan Vidyattama, 2004).

Keberhasilan pembangunan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Proses pembangunan yang telah dilaksanakan telah mencapai keberhasilan yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, hasil-hasil pembangunan yang terjadi belum merata di seluruh kawasan Indonesia. Masih terdapat daerah yang maju dan daerah yang terbelakang. Ketidakmerataan ini perlu diperhatikan karena keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat tetapi juga dilihat dari sisi pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional haruslah dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan taraf hidup masyarakat, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dengan kata lain masih terdapat ketimpangan atau kesenjangan

antar daerah. Ketimpangan tersebut meliputi ketimpangan antar pulau, antar kawasan, antar provinsi, antar kotamadya/kabupaten dan antar desa-kota.

Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Daerah yang tertinggal mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat. Beberapa daerah meminta pembagian transfer pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dan meminta kekuasaan yang lebih luas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah. Adanya perbedaan kemakmuran yang terjadi baik di dalam satu region atau antar region dapat disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya. Ketimpangan pembangunan dapat dihitung dengan berbagai indeks, salah satunya adalah indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil digunakan karena indeks ini memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil.

Pembangunan ekonomi secara spasial biasanya merujuk pada dua kondisi yaitu ketimpangan dan konsentrasi. Konsentrasi aktifitas ekonomi pada di suatu wilayah dapat memunculkan keuntungan aglomerasi (*agglomeration economies*). Keuntungan tersebut berupa keuntungan lokalisasi (*localisation economies*) dan keuntungan urbanisasi (*urbanisation economies*). Adanya faktor-faktor seperti mobilitas, capital dan buruh menyebabkan aktifitas aglomerasi dalam satu region dapat merugikan region lainnya. Bagi negara sedang berkembang, supaya pembangunan tidak hanya menumpuk pada suatu daerah atau region, maka perlu

campur tangan pemerintah terutama untuk membantu perkembangan daerah – daerah yang terbelakang atau sulit berkembang.

Penelitian ini menggunakan Indeks Hirschman-Harfindahl dan Indeks Krugman untuk menganalisis proses aglomerasi. Indeks Hirschman-Harfindahl digunakan untuk mengetahui keanekaragaman suatu wilayah atau variasi aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Begitu pula indeks Krugman digunakan untuk mengukur konsentrasi aktifitas perekonomian antar wilayah.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar selain itu Jawa Timur juga merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar bagi Indonesia. Oleh karena itu perekonomian Jawa Timur mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional baik di bidang perdagangan, industri pengolahan maupun penghasil bahan pangan. Secara sektoral, sektor yang paling berperan sebagai penggerak ekonomi Jawa Timur adalah sektor industri, perdagangan dan jasa (BPS,2001). Namun mulai tahun 2003 hingga saat ini sektor perdagangan adalah sektor yang paling dominan dalam pendapatan perekonomian Jawa Timur (PDRB).

Dalam perencanaan wilayahnya, provinsi Jawa Timur membagi wilayahnya menjadi empat Koridor Pembangunan, yaitu :

1. **Koridor Utara-Selatan** meliputi Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota. Malang, Kota. Pasuruan, Kota. Blitar, Kota Batu, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.



2. **Koridor Barat Daya** meliputi Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kota Kediri dan Kota Madiun.
3. **Koridor Timur** meliputi Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo.
4. **Koridor Utara** meliputi Kab Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

Pembagian wilayah berdasar koridor ditetapkan oleh Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan spasial di Jawa Timur.

Tujuan pembagian wilayah tersebut adalah agar proses pembangunan dapat terlaksana secara merata dan untuk mengembangkan potensi yang ada di masing-masing kawasan. Perbedaan potensi di tiap wilayah tidaklah sama baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kondisi geografisnya. Perbedaan tersebut menyebabkan besarnya kontribusi PDRB pada masing-masing wilayah berbeda.

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi (PDRB) antar Koridor di provinsi Jawa Timur. Kontribusi pembangunan ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1997-2003 disumbang oleh Koridor

Utara-Selatan dimana Koridor Utara-Selatan mendominasi lebih dari 50% dan kontribusi paling rendah disumbang oleh Koridor Utara.

**TABEL 1.1**  
**PDRB JAWA TIMUR MENURUT KORIDOR, ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993**  
**TAHUN 1997-2003**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

	<b>1997</b>	<b>%</b>	<b>1999</b>	<b>%</b>	<b>2001</b>	<b>%</b>	<b>2003</b>	<b>%</b>
<b>Utara-Selatan</b>	35,790,388.81	55.19	29,134,777.05	52.91	31,452,921.03	53.71	34,623,140.34	54.57
<b>Barat- Daya</b>	13,362,820.14	20.60	11,951,646.23	21.71	12,367,242.05	21.12	13,057,642.25	20.58
<b>Timur</b>	8,352,072.63	12.88	7,372,407.35	13.39	7,848,106.39	13.40	8,358,978.32	13.17
<b>Utara</b>	7,348,294.31	11.33	6,603,406.55	11.99	6,891,910.93	11.77	7,411,367.43	11.68
<b>Jawa Timur</b>	<b>64,853,575.89</b>	<b>100</b>	<b>55,062,237.18</b>	<b>100</b>	<b>58,560,180.40</b>	<b>100</b>	<b>63,451,128.34</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Jawa Timur berbagai tahun, diolah.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Jawa Timur telah memberikan dampak pembangunan yang berbeda antar koridor pembangunan. Oleh karena itu pengamatan terhadap peran aglomerasi dalam pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Timur sangat perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran proses aglomerasi terhadap pembangunan ekonomi. Sehingga penelitian untuk mengetahui bagaimana peran proses aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Jawa Timur perlu dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. .Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/Kota *dalam koridor* pembangunan di Jawa Timur pada tahun 1997 – 2003?
2. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi *antar koridor* pembangunan di Jawa Timur?
3. Bagaimana hasil pengukuran aglomerasi di setiap koridor pembangunan di Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kabupaten/Kota *dalam koridor* pembangunan di Jawa Timur pada tahun 1997 – 2003.
2. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi *antar koridor* pembangunan di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui proses aglomerasi di setiap koridor pembangunan di Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah, sebagai tambahan pengetahuan mengenai permasalahan di bidang ketimpangan pembangunan ekonomi dan aglomerasi.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai ketimpangan pembangunan.
3. Manfaat kebijaksanaan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jatim.

## 1.5 Sistematika skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, secara garis besar kerangka pembahasan masing-masing bab adalah :

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan ekonomi, konsep tentang disparitas regional, konsep tentang aglomerasi, penelitian-penelitian sebelumnya dan model analisis.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

### **BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek dan obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan yang berhubungan dengan hasil penelitian

### **BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai bab terakhir dari penyusunan skripsi ini akan disajikan simpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang mungkin dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil langkah kebijaksanaan selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Konsep pembangunan ekonomi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu identik dengan pertumbuhan. Pengertian pembangunan tidak hanya sekedar bagaimana menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun tetapi juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan aktifitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat suatu negara. Pembangunan mengandung arti lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat (Djojohadikusumo, 1994 : 2).

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi diatas mempunyai pengertian bahawa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu : (1) suatu proses yang berarti perubahan yang terus-menerus. (2) usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. (3) kenaikan

pendapatan per kapita itu terus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 1985: 13).

Menurut Jhingan (2000: 41-56), pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di suatu negara memerlukan beberapa persyaratan dasar yaitu:

1. proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kekuatan dalam negeri itu sendiri sedangkan peranan negara atau daerah luar hanya bersifat sebagai penunjang. Bantuan luar negeri hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan dan tidak untuk mempertahankannya.
2. usaha untuk menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Gejala ini akan menyebabkan immobilitas dari faktor produksi dan menghambat ekspansi ekonomi dan pembangunan.
3. perubahan struktural perekonomian yang mengandung arti peralihan dari masyarakat yang bercorak pertanian menjadi bercorak industri modern. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak. Produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.
4. faktor berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah faktor pembentukan modal. Pembentukan modal ini berjalan melewati tiga tingkatan antara lain :  
(1) kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung; (2) keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana

yang dapat diinvestasikan; (3) penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Komponen pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan dengan pendapatan nasional atau PDB. Sedangkan untuk tingkat daerah/region adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi (Arsyad, 1999: 6).

Pola pertumbuhan ekonomi regional tidaklah sama dengan apa yang lazim ditemukan pada pertumbuhan nasional. Hal ini disebabkan karena analisis pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Secara umum, pendapat-pendapat dalam bidang teori pertumbuhan regional dapat dibagi dalam empat kelompok besar yaitu : *Export Base-Models*, *Neo-Classic*, jalur pemikiran ala *Keynes* dan model *Core Periphery* (Sjafrizal, 1985 : 331).

*Export Base-Models* pandangannya berdasarkan pada sudut teori lokasi. Model *Neo-classic* analisisnya berdasarkan pada peralatan fungsi produksi, yaitu bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini terdapat hubungan antara



tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran suatu daerah (disparitas regional) pada negara yang bersangkutan. Dikatakan bahwa pada saat pembangunan baru dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung tinggi, sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun. Hal ini disebabkan masih belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi serta masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk dan modal antar daerah (Sjafrizal, 1985 : 333).

Jalur pemikiran ala Keynes berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Neo-klasik, tetapi hal ini baru akan dapat dilakukan melalui campur tangan aktif pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah terutama untuk daerah-daerah yang masih terbelakang (Sjafrizal, 1985 : 334).

Model Core Periphery menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan desa (*periphery*). Teori ini berpendapat bahwa gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan tersebut juga dapat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah sangat ditonjolkan (Sjafrizal, 1985 : 334).

### 2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 1999 ; 108).

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut **daerah homogen**.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut **daerah nodal**.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Dalam hal ini pengertian daerah didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut **daerah perencanaan** atau **daerah administrasi** (Arsyad, 1999: 107-108).

Menurut Djodipuro (1992: 216) secara garis besar daerah dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) daerah padat, (2) daerah yang mengalami kemunduran dan (3) daerah terbelakang. Daerah padat merupakan daerah yang kegiatan ekonominya telah mencapai skala yang mulai membawakan berbagai pemborosan (*diseconomies*) sosial maupun ekonomi. Daerah yang mengalami kemunduran berarti pernah mencapai kemajuan. Daerah demikian pada umumnya mempunyai tanda-tanda daerah maju, biasanya pengangguran yang meningkat merupakan kriteria daerah tersebut. Daerah terbelakang merupakan daerah dengan kapasitas maupun sumber produksi yang belum atau kurang dikembangkan. Sumber alam banyak yang belum dimanfaatkan di daerah ini. Daerah ini pada umumnya ditandai dengan taraf hidup yang rendah (Djojodipuro, 1992: 216-7).

Identifikasi dan seleksi daerah terbelakang merupakan langkah awal perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan mengurangi kekuatan proses polarisasi. Pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai indikator untuk menemukan kelompok daerah terbelakang. Daya tarik daerah terbelakang umumnya sangat kecil baik karena kondisi daerahnya yang langka sumber alam dan tenaga kerja. Identifikasi kegiatan yang menggambarkan keunggulan komparatif daerah tersebut merupakan tugas utama pemerintah daerah (Azis, 1994 : 65).

Prinsip keunggulan komparatif perlu memperhitungkan biaya pengangkutan karena sebagian besar bahan baku harus diimpor dari daerah lain sehingga

menimbulkan unsur keterkaitan antar daerah. Keterkaitan antar daerah merupakan faktor positif, baik ditinjau secara politis maupun dari segi kepentingan integrasi ekonomi dalam negeri. Selain itu ketidak-hadiran unsur keterkaitan dapat mengurangi kemampuan daerah untuk merealisasi berbagai potensinya (Azis, 1994: 66-67).

Menurut Esmara (2005: 438), perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan melalui empat pendekatan, sesuai dengan tingkat pemerintahan di Indonesia. Pertama, perencanaan pembangunan nasional-regional, sebagaimana yang dilakukan oleh Bappenas dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Tingkat I. Kedua, perencanaan pembangunan lokal-regional, sebagaimana yang dilakukan Bappeda Daerah Tingkat I dalam penyusunan perencanaan daerahnya. Ketiga, perencanaan pembangunan lokal-lokal, sebagaimana yang dilakukan Bappeda Daerah Tingkat II. Keempat, perencanaan pembangunan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Dengan demikian pemerintah daerah bertugas untuk menarik investasi ke daerah yang bersangkutan. Investasi tersebut baik merupakan investasi swasta dalam negeri maupun investasi asing akan mempengaruhi sekali laju pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.1.3 Disparitas Regional**

Ketimpangan regional atau daerah merupakan akibat dari proses pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan

ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Demikian pula konsentrasi pembangunan yang hanya pada beberapa wilayah saja dan kecenderungan mengumpulnya industri di beberapa wilayah menyebabkan ketimpangan regional makin besar.

Berdasarkan dari studi yang ada, Tambunan (2003 : 178-82) menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi perekonomiannya cenderung tumbuh dengan cepat sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

2. Alokasi investasi

Ada korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur.

3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

Perpindahan faktor produksi antar daerah merupakan pendorong pembangunan ekonomi antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor

produksi seperti tenaga kerja dan kapital menyebabkan ketimpangan ekonomi regional semakin bertambah besar.

4. Perbedaan sumber daya alam antar daerah

Sumber daya alam merupakan modal awal pembangunan sehingga harus dikembangkan terus. Untuk itu, diperlukan faktor-faktor lain diantaranya adalah teknologi dan sumber daya manusia. Pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia jauh lebih penting dibandingkan sumber daya alam dalam menentukan maju tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

5. Perbedaan kondisi demografis antar daerah

Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor-faktor ini juga mempengaruhi ketimpangan ekonomi regional.

6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

Ketidaklancaran perdagangan yang disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia.

Menurut Myrdal (Jhingan, 2000: 211-6; Sukimo, 1985: 238-40) pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-akibat sirkuler yang menyebabkan daerah maju semakin maju sedangkan daerah yang tertinggal menjadi semakin tertinggal. Berdasarkan teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi, Myrdal berpendapat

berpendapat bahwa daerah kaya/maju akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi dan meninggalkan daerah tertinggal dengan jarak yang semakin melebar.

Pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah tertinggal untuk berkembang. Keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai *backwash effects* (dampak balik). Perkembangan daerah-daerah maju dapat menimbulkan suatu keadaan yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah yang tertinggal. Keadaan digolongkan sebagai *Spread effects* (dampak sebar).

*Backwash effects* (dampak balik) ini disebabkan oleh adanya pembangunan yang terpusat di wilayah yang memiliki harapan laba tinggi. Daerah atau wilayah dengan kegiatan ekonomi berkembang akan menarik tenaga kerja dari daerah lain sehingga akan merangsang investasi akibat dari permintaan yang meningkat. Selain itu, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju karena menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar untuk hasil-hasil industrinya.

*Spread effects* atau dampak sebar yang menunjuk momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Dampak ini memiliki sifat positif bagi daerah yang miskin untuk mengadakan pembangunan yang lebih cepat. Pembangunan dari daerah-daerah kaya akan menyebabkan pertambahan pasar produk-produk atas hasil-hasil di daerah

miskin, terutama hasil pertanian dan hasil industri barang-barang konsumsi serta akan membawa kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.

Namun pada kenyataannya, di daerah tertinggal *spread effects* jauh lebih kecil daripada *backwash effects*. Secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah tertinggal. Akibatnya jurang kesejahteraan antar daerah kaya dan daerah tertinggal semakin lebar (Jhingan, 2000:214).

Ketimpangan pembangunan akan menyebabkan beberapa akibat yang kurang menguntungkan yang dapat terjadi pada daerah miskin maupun kaya. Daerah yang miskin akan mengalami akibat sebagai berikut :

1. Kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan memperbesar kesempatan kerja. Hal tersebut disebabkan penduduk daerah tersebut tumbuh dengan lebih cepat dari daerah kaya maka akan menyebabkan penurunan pada pendapatan perkapita dan peningkatan pengangguran.
2. Perubahan struktur ekonomi dari tradisional ke industri menjadi lambat karena terkendala kekurangan prasarana ekonomi, tenaga terampil dan sebagainya. Sehingga struktur perekonomiannya tetap pada sektor pertanian dan industri rumah tangga.
3. Kekurangan tenaga kerja berproduktivitas tinggi karena terjadinya migrasi ke daerah kaya terutama tenaga kerja yang muda dan dinamis. Yang tinggal adalah tenaga kerja dengan produktivitas rendah sehingga keadaan ini menghambat pembangunan selanjutnya.



Daerah maju pada mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari ekspansi ekonominya, namun pada akhirnya akan mengalami kesulitan-kesulitan juga antara lain :

1. Daerah tersebut harus menampung penduduk dari daerah miskin sehingga daerah kaya akan menjadi terlalu padat. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menaikkan pengeluaran untuk menciptakan sarana publik bagi penduduk yang bertambah.
2. Daerah yang kaya akan banyak menghadapi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari perkembangannya, seperti peningkatan kemacetan lalu lintas, kejahatan, polusi udara dan lain-lain (Arsyad, 1999 : 130).

Ketimpangan pembangunan dapat dihitung dengan berbagai indeks, salah satunya adalah indeks Entropi Theil. Penelitian ini menggunakan indeks Entropi Theil karena indeks ini dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil.

*Rumusnya mana??*

#### **2.1.4 Konsep Tentang Aglomerasi**

Pelopop teori Neo-Klasik mengajukan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari penghematan aglomerasi baik penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi. Penghematan akibat lokalisasi terjadi apabila biaya produksi perusahaan pada suatu industri menurun ketika produksi total dari industri meningkat. Perusahaan dapat menikmati beberapa

manfaat dengan berlokasi di dekat perusahaan lain dalam industri yang sama. Penghematan urbanisasi terjadi bila biaya produksi suatu perusahaan turun ketika produksi seluruh perusahaan dalam wilayah perkotaan yang sama meningkat. Penghematan urbanisasi ini memberi manfaat bagi semua perusahaan di seluruh kota, tidak hanya perusahaan dalam suatu industri tertentu saja (Kuncoro, 2003 : 78). Dengan kata lain, penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi merupakan penghematan yang muncul akibat adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dalam satu wilayah. Penghematan ini akan mendorong terciptanya faktor pendukung dari aktifitas ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan keuntungan secara kumulatif bagi seluruh industri.

Definisi aglomerasi ialah suatu kekuatan yang menyebabkan adanya konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di suatu kawasan yang disebabkan oleh penghematan akibat lokasi yang berdekatan atau *economies of proximity*, yang lebih jauh dapat diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, pekerja, konsumen, maupun dengan perusahaan penyedia jasa-jasa dan bukan akibat dari perhitungan perusahaan atau para pekerja secara individual (Montgomery, 1988 dalam Kuncoro, 2002 : 24). Senada dengan Markusen (Kuncoro, 2002 : 24), menurutnya aglomerasi merupakan suatu lokasi yang yang tidak berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa. Dengan kata lain suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri.

Pendekatan yang lebih luas dipelopori oleh Paul Krugman yang memproklamirkan paradigma Teori Ekonomi Geografi. Menurut teori ini, perbedaan kemakmuran antar daerah dapat dijelaskan karena adanya aktifitas aglomerasi. Adanya faktor mobilitas, modal dan tenaga kerja menyebabkan aktifitas aglomerasi di suatu daerah merugikan daerah lainnya (Oliveira, 2004).

Teori ini menjelaskan aktifitas aglomerasi di suatu daerah dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang berlawanan yaitu kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal. Kekuatan sentripetal meningkatkan aktifitas aglomerasi di beberapa daerah sedangkan kekuatan sentrifugal menyebabkan aktifitas dispersi/peyebaran antar daerah. Dengan kata lain, ketimpangan antar daerah disebabkan karena kekuatan sentripetal lebih besar daripada kekuatan sentrifugal (Oliveira, 2004).

Kekuatan sentripetal berhubungan dengan adanya biaya transpor, timbulnya pasar tenaga kerja dan eksternalitas positif. Biaya transpor akan menjadi suatu pertimbangan dalam mendirikan suatu perusahaan, dimana adanya fasilitas infrastruktur transportasi yang memadai dan kedekatan dengan akses baik dengan pasar atau dengan sumber input menjadi faktor pendirian suatu perusahaan di suatu daerah untuk menghemat biaya transpor. Faktor diatas menyebabkan terkonsentrasinya suatu industri di wilayah tertentu (Krugman, 1998; Oliveira, 2004).

Konsentrasi industri di suatu wilayah selain akan menarik datangnya para pekerja baik yang terampil ataupun yang belum terampil juga akan menciptakan eksternalitas positif berupa adanya transfer informasi/pengetahuan (*knowledge*

*spillovers*). Pertukaran informasi ini terjadi karena pekerja dari perusahaan yang berbeda saling menukar informasi tentang ide dan produk baru (Krugman, 1998 ; Oliveira, 2004).

Kekuatan sentrifugal berhubungan dengan faktor produksi yang tak bergerak dan eksternalitas negatif. Faktor produksi tak bergerak yang dimaksud disini adalah tanah. Konsentrasi industri di suatu wilayah akan mendorong harga tanah di wilayah tersebut karena tingginya permintaan akan tanah. Kenaikan harga tanah akan meningkat hingga tidak dapat mengimbangi keuntungan-keuntungan yang diperoleh akibat aglomerasi sehingga akan mencari di daerah lain dengan harga yang lebih murah. Konsentrasi industri juga dapat menyebabkan eksternalitas negatif berupa timbulnya kemacetan dan kejahatan (Krugman, 1998 ; Oliveira, 2004).

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian mengenai ketimpangan pendapatan regional. Akita (2000) melakukan penelitian mengenai perbandingan antara ketimpangan pendapatan regional di Cina dengan Indonesia. Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan variabel PDRB dan jumlah penduduk yang dihitung dengan indeks entropi Theil untuk mengukur besarnya ketimpangan pendapatan regional yang terjadi. Sedangkan perbedaannya adalah Akita menghitung ketimpangan yang terjadi di Cina dan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukannya adalah ketimpangan pendapatan regional masih banyak terjadi di kedua negara. Pemanfaatan

sumber daya alam yang tidak maksimal dan fasilitas transportasi yang kurang memadai menyebabkan ketimpangan antar daerah masih banyak terjadi di kedua negara. Selain itu, Akita juga menjelaskan bahwa peningkatan aktifitas perekonomian hanya terjadi di daerah yang mengalami penghematan aglomerasi saja.

Oliveira (2004) melakukan penelitian mengenai ketimpangan regional di Brazil bagian Selatan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan indeks entropi Theil. Selain itu Oliveira juga menghitung ketimpangan antar region dan ketimpangan dalam region. Variabel yang digunakannya adalah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Perbedaannya adalah penelitian Oliveira dilakukan di Brazil. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ketimpangan regional di wilayah tersebut mengalami peningkatan terutama yang terjadi di dalam region. Peningkatan tersebut disebabkan oleh lokasi industrial dan urbanisasi.

Wibowo (2003) juga melakukan penelitian mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tetapi penelitiannya menggunakan indeks Williamson. Penelitian tersebut selain menggunakan data PDRB juga menggunakan variabel investasi daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan variabel PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi dengan menggunakan indeks Theil. Selain itu dalam skripsi ini tidak menggunakan variabel investasi.

## 2.3. Model Analisis

### 2.3.1. Metode Pengukuran Ketimpangan Dalam Koridor

Penelitian ini menggunakan indeks Entropi Theil karena indeks ini dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil. Indeks ini selain berguna menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu juga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan spasial.

Indeks Theil diatas dapat digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam grup/koridor dan antar grup/koridor. Besarnya ketimpangan dalam koridor dapat di rumuskan sebagai berikut ini (Akita, 2000):

$$T_{pi} = \sum_j \left[ \frac{Y_{ij}}{Y_i} \right] \log \left[ \frac{\left( \frac{Y_{ij}}{Y_i} \right)}{\left( \frac{N_{ij}}{N_i} \right)} \right] \quad (2.2)$$

dimana :

- $T_{pi}$  : ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor
- $Y_{ij}$  : PDRB kota j di koridor i
- $Y_i$  : total PDRB koridor i
- $N_{ij}$  : jumlah populasi di kab/kota j di koridor i
- $N_i$  : total populasi koridor i
- i : koridor i

j : kab/kota j

Sehingga ketimpangan dalam grup/koridor adalah:

$$T_w = \sum_i \left[ \frac{Y_i}{Y} \right] T_{pi} \quad (2.3)$$

dimana :

$T_w$  : ketimpangan dalam koridor  
 $Y_i$  : PDRB koridor i  
 $Y$  : PDRB Provinsi Jawa Timur

### 2.3.2. Metode Pengukuran Ketimpangan Antar Koridor

Ketimpangan antar grup/koridor dihitung menggunakan rumus (Akita, 2000):

$$T_B = \sum_i \left[ \frac{Y_i}{Y} \right] \log \left[ \frac{\left( \frac{Y_i}{Y} \right)}{\left( \frac{N_i}{N} \right)} \right] \quad (2.4)$$

dimana :

$T_B$  : ketimpangan antar Koridor  
 $Y_i$  : PDRB koridor i  
 $Y$  : PDRB Provinsi Jawa Timur  
 $N_i$  : Jumlah populasi koridor i

$N$  : Jumlah populasi Provinsi Jawa Timur

Dari persamaan (2.3) dan (2.4) dapat digabungkan menjadi suatu persamaan sebagai berikut :

Ketimpangan Total ( $T_{Total}$ ) = Ketimpangan dalam koridor ( $T_W$ ) + Ketimpangan antar koridor ( $T_B$ )

$$T_{Total} = T_W + T_B \quad (2.5)$$

Indeks ini digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah/grup baik dalam grup atau antar grup. Nilai indeks Theil berada diantara 0 dan 1 dengan kata lain nilai indeks ini adalah:

$$0 < T < 1$$

Nilai indeks jika mendekati 0 berarti ketimpangan di suatu daerah semakin kecil sehingga dapat diartikan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut semakin merata. Sebaliknya bila angka indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan di dalam koridor atau antar koridor semakin besar.

### 2.3.3 Metode Pengukuran Aglomerasi

#### 2.3.3.1 Metode Pengukuran Aglomerasi Herfindahl

Penelitian ini menggunakan indeks Herfindahl untuk mengukur keanekaragaman aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Indeks tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :



$$HHI_{ij} = \frac{\sum_{i=1, i \neq j} \left( \frac{Y_i}{Y} \right)^2}{\left( \sum_{i=1, i \neq j} \frac{Y_i}{Y} \right)^2}$$

dimana :

- HHI<sub>ij</sub> : nilai Indeks Herfindahl  
 Y<sub>ij</sub> : PDRB Koridor i  
 Y : PDRB total provinsi Jawa Timur

Keanekaragaman aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah dapat mendorong eksplorasi dan mencegah stagnasi sehingga berperan dalam pertumbuhan regional. Nilai minimum indeks ini adalah 0 yang berarti tidak ada konsentrasi atau terdapat keanekaragaman yang sempurna. Nilai maksimum indeks ini adalah 1 yang berarti adanya konsentrasi pada satu wilayah saja (Kuncoro, 2002).

### 2.3.3.2 Metode Pengukuran Aglomerasi Krugman

Indeks Krugman digunakan untuk mengukur konsentrasi aktifitas suatu perekonomian di suatu wilayah. Rumus indeks Krugman adalah (Sbergami, 2002) :

$$K_i = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_i}{E} - \frac{E_k}{E} \right|$$

dimana :

- $K_i$  : nilai indeks Krugman pada koridor i dan koridor k  
 $E_{ij}$  : PDRB koridor i  
 $E_{ik}$  : PDRB koridor k  
 $E$  : PDRB total provinsi Jawa Timur

Kriteria pengukurannya adalah apabila nilai indeks mendekati nol, maka kedua koridor j dan k tidak terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Bila nilai indeks mendekati dua maka kedua koridor j dan k memiliki pemusatan aktifitas ekonomi. Batas tengah antara angka nol dan dua adalah satu. Sehingga apabila nilai indeks lebih besar dari satu dianggap terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat pemusatan aktifitas ekonomi suatu kabupaten/kota, digunakan nilai rata-rata indeks seluruh koridor sebagai pembanding

besar daripada daerah lain. Ketimpangan di suatu daerah semakin kecil jika nilai indeks Theil mendekati 0, sehingga dapat diartikan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut semakin merata. Sebaliknya bila angka indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan di suatu daerah semakin besar (Akita, 2000).

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 Koridor Pembangunan yaitu, koridor Utara-Selatan, koridor Timur, koridor Barat Daya dan koridor Utara. Pengelompokan kabupaten/kota dalam satu koridor berdasarkan kedekatan geografis dan kemiripan dari corak struktur perekonomiannya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi selama satu tahun, dihitung dengan menggunakan data PDRB Provinsi Jawa Timur berdasarkan harga konstan 1993 (BPS, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) koridor adalah jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi selama satu tahun, dihitung dengan menjumlahkan data PDRB Kabupaten/Kota pada tiap-tiap koridor berdasarkan harga konstan 1993.

Jumlah penduduk Jawa Timur ialah banyaknya penduduk yang berada pada wilayah Jawa Timur pada saat diadakan sensus atau pendataan oleh badan pusat statistik pada suatu waktu tertentu (BPS, 2004).

Jumlah penduduk per koridor ialah banyaknya penduduk seluruh kab/kota yang berada di tiap-tiap koridor di Jawa Timur pada saat diadakan sensus atau pendataan oleh badan pusat statistik pada suatu waktu tertentu.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dihimpun dari berbagai sumber antara lain: (1) Data PDRB provinsi Jawa Timur dari tahun 1997-2003 atas dasar harga konstan 1993 berdasarkan koridor pembangunannya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2) Data jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Timur dari tahun 1997-2003 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (3) Data pendukung lainnya seperti data pembagian koridor pembangunan Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari sumber-sumber lain.

#### **3.5. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai laporan penelitian dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah kembali untuk dianalisis sesuai rumusan permasalahan.

#### **3.6. Teknik analisis**

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Indeks Entropi Theil, Indeks Hirschman-Herfindahl dan Indeks Krugman.

### 3.6.1 Indeks Entropi Theil Dalam Koridor

Indeks Theil diatas dapat digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam grup/koridor dan antar grup/koridor. Besarnya ketimpangan dalam koridor dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$T_{pi} = \sum_j \left[ \frac{Y_{ij}}{Y_i} \right] \log \left[ \frac{\left( \frac{Y_{ij}}{Y_i} \right)}{\left( \frac{N_{ij}}{N_i} \right)} \right] \quad (2.2)$$

dimana :

$T_{pi}$	:	ketimpangan antar kota/kabupaten dalam satu koridor
$Y_{ij}$	:	PDRB kota j di koridor i
$Y_i$	:	total PDRB koridor i
$N_{ij}$	:	jumlah populasi di kota j di koridor i
$N_i$	:	total populasi koridor i
$i$	:	koridor i
$j$	:	kota j

Sehingga ketimpangan dalam grup/koridor adalah :

$$T_w = \sum_i \left[ \frac{Y_i}{\bar{Y}} \right] T_{pi} \quad (2.3)$$

dimana :

$T_w$	:	ketimpangan dalam koridor
$Y_i$	:	PDRB koridor i
$Y$	:	PDRB Provinsi Jawa Timur

### 3.6.2 Indeks Entropi Theil Antar Koridor

Ketimpangan antar gup/koridor dihitung menggunakan rumus :

$$T_B = \sum_i \left[ \frac{Y_i}{Y} \right] \log \left[ \frac{\left( \frac{Y_i}{Y} \right)}{\left( \frac{N_i}{N} \right)} \right] \quad (2.4)$$

dimana :

$T_B$	:	ketimpangan antar Koridor
$Y_i$	:	PDRB koridor i
$Y$	:	PDRB Provinsi Jawa Timur
$N_i$	:	Jumlah populasi koridor i
$N$	:	Jumlah populasi Provinsi Jawa Timur

Dari persamaan (2.3) dan (2.4) dapat digabungkan menjadi suatu persamaan sebagai berikut :

Ketimpangan Total ( $T_{Total}$ ) = Ketimpangan dalam koridor ( $T_w$ ) + Ketimpangan antar koridor ( $T_B$ )

$$T_{Total} = T_w + T_B \quad (2.5)$$

Indeks ini digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan yang terjadi antar kab/kota dalam koridor atau antar koridor. Nilai indeks Theil antara 0 dan 1 atau :

$$0 < T < 1$$

Apabila nilai indeks Theil mendekati 0 berarti ketimpangan di dalam/antar koridor semakin kecil sehingga dapat diartikan pelaksanaan pembangunan tersebut semakin merata. Sebaliknya, bila angka indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan di dalam/antar koridor semakin besar.

### 3.6.3 Metode Pengukuran Aglomerasi

#### 3.6.3.1 Indeks Herfindahl

Indeks tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$HHI = \frac{\sum_{i=1, i \neq j} \left( \frac{Y_i}{Y} \right)^2}{\left( \sum_{i=1, i \neq j} \frac{Y_i}{Y} \right)^2}$$

dimana :

HHI : nilai Indeks Herfindahl

- $Y_i$  : PDRB Koridor i  
 $Y$  : PDRB total Provinsi Jawa Timur

Nilai minimum indeks ini adalah 0 yang berarti tidak ada konsentrasi atau terdapat keanekaragaman yang sempurna. Nilai maksimum indeks ini adalah 1 yang berarti terdapat konsentrasi pada satu koridor saja.

### 3.6.3.4 Indeks Krugman

Rumus indeks Krugman adalah :

$$K_{ik} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_i}{E} - \frac{E_k}{E} \right|$$

dimana :

- $K_{ik}$  : nilai indeks Krugman koridor i dan koridor k  
 $E_i$  : PDRB koridor i  
 $E_k$  : PDRB koridor k  
 $E$  : PDRB total Jawa Timur

Kriteria pengukurannya adalah apabila nilai indeks mendekati nol, maka kedua koridor j dan k tidak terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Bila nilai indeks mendekati dua maka kedua koridor j dan k memiliki pemusatan aktifitas ekonomi. Batas tengah antara angka nol dan dua adalah satu. Sehingga apabila nilai indeks lebih besar dari satu dianggap terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Untuk



melihat tinggi rendahnya tingkat pemusatan aktifitas ekonomi suatu kabupaten/kota, digunakan nilai rata-rata indeks seluruh koridor sebagai pembanding.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur**

##### **4.1.1. Kondisi Geografis**

Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Provinsi Jawa Timur terletak pada koordinat  $111^{\circ} - 114^{\circ}4'$  bujur Timur dan  $7^{\circ}12' - 8^{\circ}43'$  lintang Selatan. Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dalam perencanaan wilayahnya, Provinsi Jawa Timur membagi wilayahnya menjadi 4 Koridor Pembangunan, yaitu :

1. **Koridor Utara-Selatan** meliputi Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.
2. **Koridor Barat Daya** meliputi Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kota Kediri dan Kota Madiun.

3. **Koridor Timur** meliputi Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo.
4. **Koridor Utara** meliputi Kab Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.

Batas-batas wilayah Jawa Timur antara lain di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Jawa Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah daratan Jawa Timur adalah 47.922 km<sup>2</sup>, sedangkan sisanya adalah lautan dengan luas wilayah kurang lebih 200.000 km<sup>2</sup>.

Menurut kondisi geografisnya, Jawa Timur dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. dataran tinggi (lebih dari 100 m di atas permukaan laut). Daerah ini meliputi Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Batu.
2. dataran sedang (45-100 m). Daerah ini meliputi Kab. Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Jember, Ngawi, Madiun, Bangkalan dan dua kota yaitu Kota Kediri dan Kota Madiun.

3. dataran rendah (di bawah 45 m). Daerah ini terdiri dari 16 Kabupaten dan 4 kota lainnya.

Berdasarkan letak geografis, kondisi sosio-kultur, potensi alam dan infrastruktur, maka Jawa Timur dibagi menjadi 4 bagian yaitu bagian Utara dan Pulau Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur, bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur yang infrastrukturnya sudah tertata dengan baik. Bagian Selatan-Barat merupakan daerah yang relatif kurang subur namun memiliki potensi tambang yang besar. Sedangkan bagian Timur karena berdekatan dengan Pulau Bali, maka industri dan perdagangan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

#### **4.1.2. Kondisi Kependudukan Dan Ketenagakerjaan**

Penduduk merupakan subyek dan obyek dari pembangunan. Penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang menguntungkan bagi pembangunan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 4.1 menunjukkan pada tahun 1997 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai angka 34.683.130 jiwa, sedangkan pada tahun 1999 meningkat sebesar 1,8% menjadi 35.319.221 jiwa. Tahun 2001 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 0,4% menjadi 35.461.638 jiwa hingga tahun 2003 jumlah

penduduk Jawa Timur adalah 36.226.651 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 0,7%.

Jumlah penduduk Jawa Timur terbesar berada di koridor Utara-Selatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk koridor Utara-Selatan tercatat sebesar 12.691.087 jiwa atau 35,03 % dari total penduduk Jawa Timur. Sedangkan koridor Timur merupakan koridor dengan jumlah penduduk paling kecil yaitu 7.255.286 jiwa atau 20,03 % dari total penduduk Jawa Timur.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota, maka jumlah penduduk paling banyak berada di Kota Surabaya. Hingga tahun 2003, jumlah penduduk di Surabaya sebesar 2.660.381 jiwa atau sebesar 7,34% dari total penduduk di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk dari daerah lain yang pindah ke kota Surabaya. Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan administrasi Provinsi Jawa Timur tentunya menjadikan daya tarik bagi penduduk di daerah lain untuk melakukan migrasi. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk terkecil se-Jawa Timur adalah Kota Mojokerto yang berjumlah 111.999 jiwa pada tahun 2003.

Dengan luas wilayah sekitar 47.922 km<sup>2</sup> maka tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 780 jiwa/ km<sup>2</sup>. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 tampak ada peningkatan kepadatan penduduk sekitar 22 jiwa/ km<sup>2</sup>, hal ini diakibatkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara luas wilayah tidak berubah (SUSENAS, 2003)

**TABEL 4.1**  
**JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI JAWATIMUR**  
**TAHUN 1997, 1999, 2001, 2003**

No	Kab/Kodya	1997	1999	2001	2003
1	Kab. Gresik	945,290	974,074	1,026,488	1,059,822
2	Kab. Sidoarjo	1,429,172	1,531,376	1,592,385	1,776,187
3	Kab. Mojokerto	852,952	873,121	955,233	968,502
4	Kab. Blitar	1,062,216	1,061,366	1,100,663	1,110,726
5	Kab. Malang	2,389,859	2,434,733	2,322,699	2,338,865
6	Kab. Pasuruan	1,311,294	1,354,382	1,381,027	1,419,716
7	Kodya. Malang	794,366	829,424	756,294	767,567
8	Kodya. Pasuruan	168,491	173,981	172,840	176,730
9	Kodya. Blitar	124,489	125,765	122,683	123,335
10	Kodya. Mojokerto	109,754	113,007	110,100	111,999
11	Kodya. Surabaya	2,801,979	2,915,994	2,633,067	2,660,381
12	Kodya. Batu			170,030	177,256
	<b>Utara-Selatan</b>	<b>11,989,862</b>	<b>12,387,223</b>	<b>12,343,509</b>	<b>12,691,087</b>
13	Kab. Pacitan	512,639	513,305	532,726	538,392
14	Kab. Ponorogo	866,879	872,417	974,735	869,359
15	Kab. Madiun	649,188	650,521	653,421	656,918
16	Kab. Magetan	637,178	636,558	621,738	620,750
17	Kab. Trenggalaek	660,542	670,209	663,790	680,005
18	Kab. Tulungagung	921,933	927,967	949,197	960,067
19	Kab. Kediri	1,405,657	1,420,277	1,155,700	1,474,840
20	Kab. Jombang	1,107,732	1,123,043	1,152,962	1,172,439
21	Kab. Nganjuk	981,578	988,941	1,015,318	1,028,236
22	Kodya. Madiun	173,840	174,671	169,595	169,481
23	Kodya. Kediri	267,194	271,613	251,697	252,033
	<b>Barat-Daya</b>	<b>8,184,360</b>	<b>8,249,522</b>	<b>8,140,880</b>	<b>8,422,521</b>
24	Kab. Lumajang	950,191	953,281	987,939	1,002,466
25	Kab. Probolinggo	983,143	1,002,401	1,017,365	951,112
26	Kab. Banyuwangi	1,494,419	1,499,781	1,526,870	1,539,948
27	Kab. Jember	2,142,749	2,158,996	2,205,492	2,231,793
28	Kab. Bondowoso	682,694	687,788	700,692	708,646
29	Kab. Situbondo	602,309	609,236	613,778	621,067
30	Kodya. Probolinggo	195,690	201,806	196,591	200,252
	<b>Timur</b>	<b>7,051,195</b>	<b>7,113,288</b>	<b>7,248,727</b>	<b>7,255,286</b>
31	Kab. Lamongan	1,199,421	1,212,846	1,221,528	1,235,890
32	Kab. Bojonegoro	1,167,428	1,184,117	1,195,706	1,212,700
33	Kab. Tuban	1,045,765	1,065,283	1,061,529	1,077,088
34	Kab. Ngawi	816,014	816,265	833,908	839,949
35	Kab. Sampang	770,195	791,554	812,612	833,640
36	Kab. Pamekasan	688,901	708,280	722,148	740,154
37	Kab. Sumenep	979,711	990,749	1,016,812	1,032,260
38	Kab. Bangkalan	790,278	800,093	864,279	886,077
	<b>Utara</b>	<b>7,457,713</b>	<b>7,569,187</b>	<b>7,728,522</b>	<b>7,857,758</b>
	<b>Jawa Timur</b>	<b>34,683,130</b>	<b>35,319,221</b>	<b>35,461,638</b>	<b>36,226,651</b>

Sumber : PDRB Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penduduk usia 10 tahun ke atas digolongkan sebagai angkatan kerja jika mereka bekerja atau sedang mencari kerja dan bukan angkatan kerja jika mereka bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lainnya. Pada tahun 2003 dari sekitar 30,29 juta merupakan penduduk usia 10 tahun ke atas, sekitar 63,02 % diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari 90,91 % penduduk yang melakukan kegiatan bekerja dan sekitar 9,09 % merupakan pengangguran. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja (sebesar 36,98 %) terdiri dari 47,81% mengurus rumah tangga, sekitar 36,91 % bersekolah dan sekitar 15,27 % melakukan kegiatan lain (SUSENAS, 2003).

Dari 9 sektor yang ada, sektor pertanian merupakan sektor utama yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Jawa Timur yaitu sekitar 49,06 % kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sekitar 17,90 % . Sektor terbesar berikutnya adalah sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja sekitar 12,12 %. Meskipun sektor industri lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, sektor industri memberikan kontribusi PDRB paling besar bagi Jawa Timur dibandingkan kedua sektor tersebut.

Jika dipilah menurut status pekerjaan utamanya, yang berstatus usaha sendiri sekitar 20,02 % dan yang dibantu oleh buruh sekitar 19,06 %. Penduduk yang berstatus buruh/karyawan sebesar 28,03 % selanjutnya sekitar 17,84 % sebagai pekerja keluarga dan sekitar 11,41 % adalah pekerja bebas (SUSENAS, 2003).

#### 4.1.3. Kondisi Perekonomian

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan keseluruhan nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Oleh karena itu besaran PDRB dalam periode tertentu sering digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaku ekonomi di suatu wilayah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada.

**TABEL 4.2**  
**PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN**  
**ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1993**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 1997-2003**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
1997	64,853,575.89	-
1998	54,398,896.52	(16.12)
1999	55,062,237.18	1.22
2000	57,056,520.81	3.62
2001	58,560,180.40	2.64
2002	60,885,056.47	3.97
2003	63,451,128.34	4.21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur. Diolah.

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 1998 nilai PDRB Jawa Timur mengalami penurunan dan laju pertumbuhan ekonomi turun hingga -16,12 % akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Namun sejak tahun 1999, nilai PDRB Jawa Timur terus mengalami peningkatan begitu pula dengan laju pertumbuhan ekonominya dari 1,22% hingga mencapai 4,21 % pada tahun 2003.



**TABEL 4.3**  
**KONTRIBUSI PDRB JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN**  
**TAHUN 1993**  
**BERDASARKAN KAB/KOTA TAHUN 1997 -2003**

No	Kab/Kodya	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Kab Gresik	5,71	5,53	5,66	5,79	5,89	5,89	5,89
2	Kab Sidoarjo	8,79	8,33	8,32	8,34	8,42	8,42	8,94
3	Kab Mojokerto	1,88	1,91	1,96	1,93	1,98	1,98	1,93
4	Kab Blitar	1,25	1,34	1,37	1,41	1,40	1,40	1,39
5	Kab Malang	3,94	4,17	4,20	4,20	3,96	3,96	3,93
6	Kab Pasuruan	4,34	4,47	4,47	4,45	4,53	4,53	4,54
7	Kodya Malang	4,09	3,81	3,77	3,72	3,74	3,74	3,70
8	Kodya Pasuruan	0,54	0,57	0,57	0,58	0,59	0,59	0,59
9	Kodya Blitar	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45
10	Kodya Mojokerto	0,50	0,52	0,52	0,52	0,54	0,54	0,54
11	Kodya Surabaya	23,70	21,94	21,62	21,58	21,90	21,90	22,03
12	Kodya Batu					0,31	0,31	0,32
	<b>Utara-Selatan</b>	<b>55,19</b>	<b>53,03</b>	<b>52,91</b>	<b>52,97</b>	<b>53,71</b>	<b>53,71</b>	<b>54,57</b>
13	Kab Pacitan	0,62	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,67
14	Kab Ponorogo	1,04	1,14	1,16	1,21	1,36	1,36	1,19
15	Kab Madiun	0,89	0,92	0,91	0,89	0,91	0,91	0,90
16	Kab Magetan	0,98	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,02
17	Kab Trenggalaek	0,64	0,70	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72
18	Kab Tulungagung	2,07	2,08	2,09	2,15	2,16	2,16	2,15
19	Kab Kediri	2,34	2,41	2,46	2,49	1,98	1,98	2,47
20	Kab Jombang	1,66	1,73	1,74	1,72	1,73	1,73	1,71
21	Kab Nganjuk	1,33	1,37	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35
22	Kodya Madiun	0,74	0,72	0,73	0,72	0,73	0,73	0,73
23	Kodya Kediri	8,29	8,92	8,82	8,57	8,45	8,45	7,66
	<b>Barat-Daya</b>	<b>20,60</b>	<b>21,72</b>	<b>21,71</b>	<b>21,54</b>	<b>21,12</b>	<b>21,12</b>	<b>20,58</b>
24	Kab Lumajang	1,60	1,63	1,63	1,61	1,63	1,63	1,61
25	Kab Probolinggo	2,09	2,18	2,16	2,11	2,12	2,12	1,94
26	Kab Banyuwangi	2,97	3,08	3,05	3,05	3,07	3,07	3,04
27	Kab Jember	3,10	3,27	3,29	3,29	3,33	3,33	3,36
28	Kab Bondowoso	0,97	1,06	1,06	1,05	1,07	1,07	1,06
29	Kab Situbondo	1,18	1,27	1,27	1,25	1,27	1,27	1,27
30	Kodya Probolinggo	0,98	0,95	0,94	0,92	0,90	0,90	0,91
	<b>Timur</b>	<b>12,88</b>	<b>13,43</b>	<b>13,39</b>	<b>13,28</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>13,17</b>
31	Kab Lamongan	1,51	1,63	1,64	1,63	1,65	1,65	1,64
32	Kab Bojonegoro	1,49	1,56	1,57	1,54	1,54	1,54	1,63
33	Kab Tuban	2,78	2,54	2,80	2,77	2,85	2,85	2,84
34	Kab Ngawi	1,10	1,18	1,18	1,17	1,18	1,18	1,16
35	Kab Sampang	1,04	1,14	1,14	1,47	1,13	1,13	1,11
36	Kab Pamekasan	0,84	0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84
37	Kab Sumenep	1,52	1,74	1,65	1,65	1,46	1,46	1,44
38	Kab Bangkalan	1,06	1,16	1,14	1,12	1,11	1,11	1,09
	<b>Utara</b>	<b>11,33</b>	<b>11,82</b>	<b>11,99</b>	<b>12,21</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>	<b>11,68</b>
	<b>Jawa Timur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur. Diolah.

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Kota Surabaya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan nilai PDRB di Jawa Timur. Kota Surabaya

pada tahun 1997 memberikan kontribusi sebesar 23,70 % kemudian turun menjadi 21,62 % pada tahun 1999. Kontribusi tersebut terus meningkat hingga 22,23 % pada tahun 2003, sedangkan kabupaten/kota lainnya kontribusinya masih dibawah 10 %. Kabupaten/kota lain yang memberi kontribusi cukup besar terhadap PDRB Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri dan Kabupaten Gresik.

Apabila dilihat berdasarkan koridor pembangunan, maka penyumbang terbesar terhadap total PDRB Jawa Timur adalah koridor Utara dimana koridor Utara mendominasi lebih dari 50 % total PDRB Jawa Timur. Kontribusi PDRB koridor Utara tiap tahun terus meningkat sedangkan koridor lainnya cenderung menurun.

**TABEL 4.4**  
**PDRB JAWA TIMUR ATAS DASAR HARGA KONSTAN**  
**TAHUN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001-2003**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**

No	Sektor	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian	10.360.819,63	9.840.471,06	1.056.430,46	10.126.247,34	10.246.976,92	10.461.674,85	10.649.954,56
2	Pertambangan dan Penggalian	875.522,36	501.798,67	820.481,97	1.138.197,73	1.136.381,98	1.176.352,64	1.202.792,84
3	Industri Pengolahan	19.409.565,66	15.104.078,20	15.096.119,16	15.357.553,01	15.597.265,77	15.335.942,61	15.767.591,92
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.143.104,29	1.179.194,65	1.332.448,19	1.483.158,36	1.594.202,10	1.710.559,78	1.868.983,76
5	Konstruksi	4.370.532,83	2.918.521,24	2.629.204,56	2.607.913,29	2.631.188,42	2.657.360,80	2.707.175,06
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.828.696,97	11.369.207,36	11.403.499,39	11.908.392,17	12.871.766,90	13.805.154,89	14.883.857,75
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.236.276,06	4.051.086,25	4.441.895,98	4.745.526,75	4.792.517,95	5.327.307,91	5.531.794,96
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.145.932,45	3.296.433,66	3.087.742,66	3.193.520,82	3.378.586,36	3.522.598,67	3.657.757,65
9	Jasa-Jasa	6.483.125,59	6.138.105,66	6.191.148,76	6.296.011,25	6.501.293,81	6.756.904,05	6.987.257,93
	<b>Jumlah</b>	<b>64.853.575,86</b>	<b>54.398.896,74</b>	<b>55.058.970,46</b>	<b>56.856.520,71</b>	<b>58.750.180,21</b>	<b>60.754.056,20</b>	<b>63.257.166,45</b>

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka, BPS Jawa Timur.

Struktur perekonomian Jawa Timur hingga tahun 2003 masih didominasi oleh sektor industri. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 24,93 % . Namun dalam

dua tahun terakhir ini perannya tergeser oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Jawa Timur terus meningkat dalam dua tahun terakhir dimana pada tahun 2003 kontribusinya sebesar 23,53 %.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor pertanian dimana peranannya tiap tahun terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2003 kontribusinya terus berkurang hingga sebesar 16,84 %. Sektor terbesar berikutnya adalah sektor jasa dengan kontribusi 11,05% di tahun 2003.

## **4.2. Hasil Perhitungan**

### **4.2.1. Tingkat ketimpangan *dalam* koridor**

Tingkat ketimpangan dalam koridor adalah ketimpangan antar kab/kota dalam satu koridor. Ketimpangan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan indeks Theil. Nilai indeks Theil berada di antara 0 dan 1. Jika nilai indeks Theil mendekati 0 berarti ketimpangan pembangunan semakin kecil. Sedangkan jika nilai indeks Theil mendekati angka 1 berarti ketimpangan pembangunan yang terjadi semakin besar.

Perhitungan Indeks Theil antar kab/kota dalam koridor pada periode 1997-2003 menunjukkan angka rata-rata yang rendah. Pada permulaan masa terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 nilai indeks Theil dalam koridor menunjukkan angka 0,115. Pada tahun 1998 ketimpangan yang terjadi menurun menjadi 0,1120 dan kembali menurun di tahun 1999 dengan nilai 0,1087.

Dari hasil perhitungan periode tahun 1997-2003, nilai ketimpangan antar kabupaten/kota dalam koridor terkecil terjadi pada tahun 2002 dengan nilai sebesar 0,1070. Pada tahun 2003 nilainya meningkat hanya sebesar 0,0002 poin menjadi 0,1072. Bila dibandingkan dengan ketimpangan antar koridor, ketimpangan antar kabupaten/kota dalam koridor memberikan presentase lebih besar terhadap ketimpangan total Provinsi Jawa Timur. Namun mulai tahun 2001 persentasenya terus menurun hingga tahun 2003 atau dengan kata lain kontribusi ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor cenderung berkurang tiap tahunnya.

Ketimpangan dalam koridor pembangunan di Jawa Timur paling besar terjadi pada koridor Barat Daya. Ketimpangan yang terjadi pada koridor Barat Daya disebabkan karena adanya *gap* yang cukup besar antara Kota Kediri dengan kabupaten/kota lainnya di wilayah koridor tersebut. Meskipun populasi penduduknya tidak begitu banyak, pendapatan per kapita kota Kediri sebesar 20 juta rupiah ternyata lebih besar dari kota Surabaya yang hanya sebesar 5 juta rupiah.

**TABEL 4.5**  
**NILAI KETIMPANGAN DALAM KORIDOR**  
**JAWA TIMUR TAHUN 1997-2003**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Utara-Selatan	0.0795091	0.0679147	0.0643690	0.0751437	0.0754501	0.076047248	0.0762093
Barat Daya	0.3260083	0.3339700	0.3275385	0.3300796	0.3308269	0.295160086	0.3001752
Timur	0.0178285	0.0149143	0.0140533	0.0146645	0.0136303	0.013539183	0.0137697
Utara	0.0178005	0.0128772	0.0144460	0.0152279	0.0189049	0.017869715	0.018129
Dalam Koridor	0.1153639	0.1120665	0.1087678	0.1147107	0.114443	0.107025381	0.1072896

Sumber : Lampiran I

Di koridor Utara-Selatan, sebagai kontributor terbesar PDRB Jawa Timur, mulai tahun 1999 nilai ketimpangannya terus meningkat hingga tahun 2003. Pada tahun 1999 nilai indeks Theilnya sebesar 0,0643 dan terus meningkat hingga tahun 2003 menjadi 0,0762. Pada koridor Utara-Selatan, ketimpangan cukup besar dijumpai pada kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Ketiga kabupaten/kota merupakan kawasan industri yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Jawa Timur.

Di koridor Timur nilai indeks Theil mengalami penurunan. Tahun 1997 nilainya menunjukkan angka 0,0178 turun menjadi 0,0137 di tahun 2003. Sebaliknya di koridor Utara nilai indeks Theil mengalami kenaikan. Pada tahun 1997 nilainya sebesar 0,0178 meningkat menjadi 0,0181 di tahun 2003.

#### **4.2.2 Tingkat ketimpangan antar koridor**

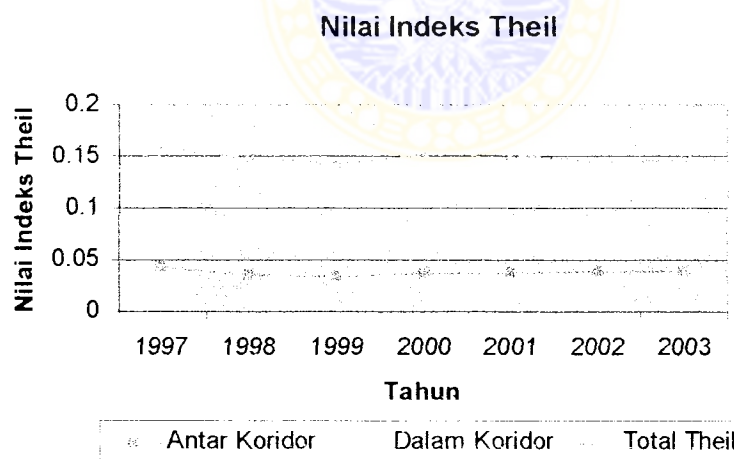
Indeks Theil selain dapat digunakan untuk mengamati ketimpangan antar kab/kota dalam koridor, juga dapat digunakan untuk mengamati ketimpangan yang terjadi antar koridor. Secara umum ketimpangan antar koridor lebih kecil persentasenya bila dibandingkan dengan ketimpangan antar kab/kota dalam satu koridor.

Dari hasil pengamatan tahun 1997-2003, nilai ketimpangan antar koridor paling kecil terjadi di tahun 1999 dengan nilai sebesar 0,0336 dan nilai tertinggi terjadi di tahun 1997 yang nilainya mencapai 0,042. Dimulai pada awal krisis ekonomi di tahun 1997 kemudian menurun di tahun 1998 pada poin 0.04. Pada tahun

2000 nilai indeks mengalami kenaikan secara kontinyu dari 0,0369 naik menjadi 0,0374 di tahun 2001, di tahun 2002 naik menjadi 0,038 dan di tahun 2003 nilainya berada pada kisaran 0,0387.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kontribusi ketimpangan antar koridor tiap tahun mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 kontribusinya sebesar 23,61 % dari ketimpangan total Jawa Timur dan nilainya terus bertambah hingga di tahun 2003 yang mencapai 26,53 % dari ketimpangan total.

**GAMBAR 4.1**  
**NILAI INDEKS THEIL JAWA TIMUR**  
**TAHUN 1997-2003**



Sumber : Lampiran 1

Dari hasil perhitungan nilai Theil total, Jawa Timur termasuk provinsi yang mempunyai tingkat ketimpangan relatif rendah dengan nilai indeks Theil total pada

kisaran antara 0,14 - 0,16. Nilai indeks Theil untuk Provinsi Jawa Timur mempunyai kecenderungan berfluktuasi. Diawali pada tahun 1997, nilai Theil total sebesar 0,153 kemudian turun pada poin 0,147 di tahun 1998. Pada tahun 1999 nilainya kembali turun menjadi 0,142. Tahun 2000 nilainya mengalami kenaikan hingga tahun 2001 mencapai level 0,1519. Tahun 2002 nilainya kembali menurun pada poin 0,145 dan di tahun 2003 nilainya meningkat menjadi 0,146.

Secara keseluruhan dalam jangka 1997-2003, ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur masih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor. Ini terlihat dari besarnya kontribusi ketimpangan antara kabupaten /kota dalam koridor dibandingkan dengan ketimpangan antar koridor. Dengan pembangunan perwilayahan melalui pembagian koridor diharapkan ketimpangan dalam koridor dan antar koridor dapat berkurang.

#### **4.2.3 Pengukuran Aglomerasi**

Aglomerasi ialah suatu kekuatan yang menyebabkan adanya konsentrasi dari aktifitas ekonomi di suatu kawasan. Tingkat konsentrasi aktifitas ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indeks Herfindahl dan indeks Krugman. Apabila nilai indeks Herfindahl mendekati 1 maka konsentrasi aktifitas ekonomi mengalami peningkatan. Sedangkan untuk indeks Krugman, konsentrasi aktifitas dikatakan meningkat apabila nilainya lebih besar dari 1.



Hasil dari perhitungan indeks Herfindahl menurut koridor, nilai tertinggi diraih oleh koridor Utara-Selatan. Hal ini menjelaskan aktifitas ekonomi di Jawa Timur terkonsentrasi pada koridor Utara-Selatan. Pada tabel 4.3 proporsi indeks Herfindahl koridor Utara-Selatan persentasenya lebih dari 75 %. Banyaknya industri-industri yang bersifat padat modal di koridor Utara-Selatan menjadi salah satu faktor terkonsentrasinya aktifitas ekonomi di kawasan ini.

Diawali pada tahun 1997, nilai indeks Herfindahl menunjukkan angka 0,304 kemudian nilainya turun menjadi 0,281 pada tahun 1998. Tahun 1999 nilainya kembali turun menjadi 0,279. Semenjak tahun 2000 nilainya mengalami kenaikan secara kontinyu dari 0,280 meningkat menjadi 0,288 di tahun 2001. Kemudian meningkat menjadi 0,290 pada tahun 2002 dan 0,297 pada tahun 2003.

**TABEL 4.6**  
**NILAI INDEKS HERFINDAHL MENURUT KORIDOR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 1997, 1999, 2001, 2003**

	1997		1999		2001		2003	
	IHH	%	IHH	%	IHH	%	IHH	%
Utara-Selatan	0.3045545	80.91	0.2799727	77.90	0.288481	79.06	0.2977517	80.23
Barat Daya	0.042455	11.28	0.0471138	13.11	0.0446006	12.22	0.0423497	11.41
Timur	0.0165852	4.41	0.0179271	4.99	0.0179608	4.92	0.0173551	4.68
Utara	0.0128382	3.41	0.0143823	4.00	0.0138508	3.80	0.0136433	3.68
Jawa Timur	0.3764329	100	0.3593959	100	0.3648931	100	0.3710998	100

Sumber : lampiran 2

Pada koridor Utara-Selatan, kota Surabaya mempunyai nilai indeks Herfindahl yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya (Lihat lampiran 4). Demikian juga kontribusi kota Surabaya terhadap indeks Herfindahl di Provinsi Jawa Timur. Dari tahun 1997-2003, nilai indeks Herfindahl kota Surabaya



Pada koridor Timur, Kabupaten Jember dan Banyuwangi mempunyai nilai indeks Herfindahl tertinggi di antara kabupaten lainnya. Sedangkan pada koridor Utara, Kabupaten Tuban merupakan daerah yang nilai indeks Herfindahlnya paling tinggi.

Selain indeks Herfindahl, indeks Krugman juga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu perekonomian di suatu wilayah. Hasil perhitungan indeks Krugman antar koridor di Jawa Timur periode 1997-2003 menunjukkan bahwa koridor Utara-Selatan memiliki nilai indeks Krugman diatas rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas perekonomian masih terkonsentrasi di koridor Utara-Selatan. Banyaknya kabupaten/kota di koridor Utara-Selatan yang merupakan kawasan industri merupakan salah satu faktor penyebab terkonsentrasinya aktifitas perekonomian di koridor tersebut.

**TABEL 4.7**  
**NILAI INDEKS KRUGMAN MENURUT KORIDOR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 1997-2003**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Utara-Selatan	1.20746	1.12133	1.11650	1.11887	1.14842	1.15774	1.18267
Barat Daya	0.51582	0.49498	0.49236	0.49024	0.49659	0.49975	0.50291
Timur	0.51565	0.49480	0.49225	0.49011	0.49632	0.49969	0.50275
Utara Indeks rata-rata	0.54678	0.52705	0.52030	0.51171	0.52924	0.53578	0.53278
	<b>0.69647</b>	<b>0.65958</b>	<b>0.65538</b>	<b>0.65276</b>	<b>0.66771</b>	<b>0.67325</b>	<b>0.68032</b>

Sumber : Lampiran 4

Pergerakan nilai indeks Krugman pada koridor Utara-Selatan cenderung berfluktuasi. Hal ini diperlihatkan pada tahun 1997 hingga tahun 1999 nilainya

mengalami penurunan hingga 1,116 poin. Pada tahun 2000 hingga 2003 nilainya meningkat secara kontinyu hingga sebesar 1,182 pada tahun 2003.

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa koridor Barat Daya dan koridor Timur ternyata mempunyai nilai indeks Krugman yang hampir sama. Perubahan nilai indeks kedua koridor pun relatif sama dimana mulai tahun 1997 nilainya mengalami penurunan hingga tahun 2000. Setelah itu, mulai tahun 2001 nilainya terus meningkat hingga tahun 2003. Sedangkan pada koridor Utara nilainya berfluktuasi dimana mulai tahun 1997 hingga tahun 2000 nilainya terus menurun kemudian kembali meningkat pada tahun 2001 dan 2002 lalu kembali turun lagi di tahun 2003.

### **4.3. Analisis Hasil Perhitungan**

Proses pembangunan ekonomi memang telah memberikan hasil-hasil positif bagi perekonomian Jawa Timur. Namun di sisi lain, proses pembangunan ekonomi ternyata telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar baik dalam bentuk ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar.

Ketimpangan pembangunan ekonomi ialah keadaan dimana suatu daerah menerima proporsi dari pelaksanaan maupun hasil pembangunan ekonomi yang lebih besar daripada daerah lain. Ketimpangan pembangunan dapat disebabkan oleh

beberapa hal. Salah satunya adalah pembangunan yang terpusat pada beberapa kabupaten/kota tertentu saja. Pertumbuhan kota-kota tertentu menjadi pusat-pusat pertumbuhan dapat memperlebar kesenjangan antar daerah sehingga proses aglomerasi akan menimbulkan daya tarik bagi para pekerja untuk melakukan migrasi menuju daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Selain itu perbedaan kelengkapan fasilitas penunjang dan infrastruktur yang memadai di tiap kabupaten/kota juga merupakan salah satu penyebab yang lainnya.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1997-2003 menunjukkan tingkatan yang cukup rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan Indeks Theil yang mempunyai *range* nilai antara 0,14 - 0,16. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat ketimpangan semakin kecil apabila nilai indeks Theil mendekati angka nol dan begitu pula sebaliknya. Ketimpangan total Provinsi Jatim dikontribusi oleh ketimpangan antar kab/kota dalam koridor dan ketimpangan antar koridor.

Hasil perhitungan Indeks Theil menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Jawa Timur masih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan antar kabupaten/kota dalam satu koridor terutama yang terjadi pada koridor Barat Daya. Ini terlihat dari besarnya *share* ketimpangan antar kabupaten/kota dalam koridor dibandingkan dengan ketimpangan antar koridor. Berdasarkan lampiran 1, ketimpangan antar kabupaten/kota dalam koridor mempunyai *share* antara 72,89% hingga 76,39% yang

penurunan kemudian meningkat secara kontinyu hingga tahun 2003. Sedangkan nilai Hefindahl kabupaten/kota mengalami penurunan pada tahun 1997 hingga tahun 2000 kemudian kembali meningkat hingga tahun 2003.

Hasil penelitian menunjukkan aktifitas perekonomian di Jawa Timur sebagian besar masih terpusat di koridor Utara-Selatan. Kecenderungan pemusatan aktifitas ekonomi tersebut dipengaruhi oleh kekuatan sentripetal seperti keuntungan lokasional yang berupa penghematan biaya transpor, kedekatan dengan akses pasar, kemudahan akses teknologi dan informasi, kemudahan *supply* dari tenaga kerja terampil serta keuntungan lainnya yang dapat ditemui di koridor Utara-Selatan.

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui 8 kabupaten/kota yang menjadi pusat-pusat aktifitas ekonomi di Jawa Timur. Dominasi itu terlihat jelas dengan melihat presentase kontribusinya, dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur kedelapan kabupaten/kota tersebut mendominasi dengan kontribusi lebih dari 90%. Dari kedelapan kabupaten/kota diatas, enam diantaranya terletak di koridor Utara-Selatan. Besarnya konsentrasi aktifitas perekonomian di koridor Utara-Selatan tidak terlepas dari peranan kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa di Jawa Timur. Adanya upaya-upaya untuk memperoleh penghematan biaya transpor dan kedekatan dengan akses pasar menyebabkan aktifitas perekonomian terkonsentrasi di Surabaya dan wilayah-wilayah di sekitarnya.

**TABEL 4.8**  
**DELAPAN KABUPATEN/KOTA DENGAN NILAI INDEKS**  
**HERFINDAHL TERTINGGI DI PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 1997, 1999, 2001, 2003**

Kab/Kodya	1997		1999		2001		2003	
	IHH	% TERHADAP JATIM	IHH	% TERHADAP JATIM	IHH	% TERHADAP JATIM	IHH	% TERHADAP JATIM
Kodya. Surabaya	0.056191	65.11	0.046738	60.20	0.047941	61.20	0.049434	62.14
Kab. Sidoarjo	0.007720	8.95	0.006921	8.91	0.007089	9.05	0.007997	10.05
Kodya. Kediri	0.006875	7.97	0.007783	10.03	0.007144	9.12	0.005873	7.38
Kab. Gresik	0.003265	3.78	0.003206	4.13	0.003474	4.43	0.003585	4.51
Kab. Pasuruan	0.001882	2.18	0.001998	2.57	0.002055	2.62	0.002060	2.59
Kab. Malang	0.001551	1.80	0.001767	2.28	0.001565	2.00	0.001545	1.94
Kodya. Malang	0.001674	1.94	0.001421	1.83	0.001397	1.78	0.001369	1.72
Kab. Jember	0.000959	1.11	0.001082	1.39	0.001110	1.42	0.001126	1.42
<b>Total</b>		<b>92.83</b>		<b>91.35</b>		<b>91.62</b>		<b>91.74</b>

Sumber : Lampiran 3

Seperti halnya dengan penghitungan menggunakan indeks Herfindahl, hasil perhitungan menggunakan indeks Krugman menunjukkan hasil yang serupa. Nilai indeks Krugman menunjukkan bahwa koridor Utara-Selatan mempunyai nilai diatas rata-rata. Sedangkan koridor lainnya nilainya dibawah rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas perekonomian masih terkonsentrasi di koridor Utara-Selatan.

Terkonsentrasinya aktifitas perekonomian di koridor Utara – Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya jalur transportasi berupa jalan tol yang melewati kota-kota di koridor Utara-Selatan. Seperti kita ketahui, banyak industri manufaktur yang berlokasi di koridor Utara-Selatan. Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan aspek-aspek seperti sarana transportasi yang akan mendukung terciptanya efisiensi biaya. Faktor Kota Surabaya juga merupakan salah satu faktor pengumpulnya aktifitas ekonomi di koridor Utara-

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dan aglomerasi pada koridor-koridor di Jawa Timur periode 1997-2003 dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dalam satu koridor paling besar terjadi pada koridor Barat Daya. Besarnya ketimpangan pada koridor Barat Daya disebabkan adanya *gap* yang cukup besar antara Kota Kediri dengan kabupaten/kota lainnya di koridor Barat Daya. Ketimpangan total di Jawa Timur sebagian besar dipengaruhi oleh ketimpangan antar kabupaten/kota dalam koridor.
2. Ketimpangan antar koridor yang terjadi di Jawa Timur masih dalam tingkatan yang rendah. Ketimpangan antar koridor menunjukkan nilai indeks Theil yang lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan dalam koridor. Analisis Indeks Theil yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi pada koridor di Jawa Timur periode 1997-2003 juga menunjukkan kisaran angka yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Theil total antara 0,14 – 0,16.

3. Hasil penelitian dengan menggunakan Indeks Herfindahl dan Indeks Krugman menunjukkan bahwa pada periode 1997-2003 aktifitas perekonomian di Jawa Timur masih terkonsentrasi di koridor Utara-Selatan. Adanya penghematan aglomerasi di koridor tersebut merupakan salah satu penyebab timbulnya kecenderungan pemusatan aktifitas ekonomi di koridor Utara-Selatan. Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Timur, tingkat konsentrasi aktifitas ekonomi terbesar terjadi di Kota Surabaya. Tersedianya sarana pendukung dan infrastruktur yang memadai menyebabkan aktifitas perekonomian terkonsentrasi di Surabaya dan wilayah-wilayah di sekitarnya.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah hendaknya menyusun kebijakan pemerataan pembangunan tidak pada daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga di daerah dengan tingkat perkembangan yang rendah. Pembangunan tersebut diupayakan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat berperan sebagai pihak yang menjembatani kerjasama antara masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur terutama permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonominya. Pada era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Daerah Jawa Timur juga harus mampu memonitor pelaksanaan otonomi yang terjadi di tiap

kabupaten/kota untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi. Sehingga diharapkan mampu memperkecil tingkat kesenjangan antar daerah.

3. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi secara merata antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan demikian kabupaten/kota memiliki kemudahan akses untuk mencapai pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga diharapkan dapat tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.





## Daftar Pustaka

- Akita, T. 2000. “*Decomposing Regional Income Inequality using Two-Stages Nested Theil Decomposition Method*”. Makalah dipresentasikan pada 6<sup>th</sup> World Congress of the Regional Science Association , 16-20 May 2000.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. BPFE : Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. LPFE – UI : Jakarta.
- Beblo, Miriam dan Thomas Knaus. 2000. “*Measuring Income Inequality in Euroland*”. CEPS/ INSTEAD Journal.
- BPS (Berbagai Edisi). *PDRB Kabupaten/Kotamadya Se-Jawa Timur*. BPS Jawa Timur.
- 2004. *Jawa Timur Dalam Angka 2003*. BPS Jawa Timur.
- 2004. *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2003 Propinsi Jawa Timur*. BPS Jawa Timur.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. LPFE UI : Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan)*. Jakarta : LP3S.
- Esmara, Hendra. 2005. “Globalisasi Ekonomi dan Pembangunan Daerah”. Dalam Buku *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia Selama Setengah Abad Terakhir. Deregulasi dan Liberalisasi Ekonomi*. Buku IV. Jakarta : ISEI.
- Istifadah, Nurul dan Ahmad Sjafii. 2005. “Strategi Penanggulangan Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur”.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krugman, Paul. 1998. “*The Role of Geography in Development*”. Makalah dipresentasikan pada pertemuan tahunan World Bank tentang Ekonomi Pembangunan, 20-21 April 1998, Washington D.C.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : UI – Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ke-3. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Oliveira, Cristiano. 2004. “*Regional Inequalities in Rio Grande do Sul : A New Economic Geography Approach*”. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science (IRSA) ke-6 , 13-14 Agustus 2004, Jogjakarta.
- Resosudarmo, Budi. P dan Yogi. V. 2004. “*Regional Income Disparity In Indonesia : A Panel Data Analysis*”. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science (IRSA) ke-6, 13-14 Agustus 2004, Jogjakarta.
- Richardson, Harry. W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Edisi Revisi. LPFE UI : Jakarta.
- Sbergami, Federica. 2002. “*Agglomeration and Economic Growth : Some Puzzles*”. HEI Working Paper No : 02.

- Sjafrizal. 1985. "Teori Ekonomi Regional : Konsep dan Perkembangan". Dalam Buku Hendra Esmara (Ed). *Memelihara Momentum Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Smith, Stephen C dan Michael P Todaro. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3*. Edisi Ke-8. Jakarta : Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : LPFE UI.
- Tadjoeddin, M., , Suharyo, W., dan Mishra, S. 2001. "Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan : Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia". UNSFIR Working Paper.
- Tambunan, Tulus. T. H. 2003. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3*. Edisi Ke-7. Jakarta : Erlangga.
- Wahyuni, Heny. 2004. "*Inequality of Distribution and Poverty Insidence In The Adjusment Period and Initial Analysis of Economic Crisis and Disintegration Issues in Indonesia*". Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Regional Science (IRSA) ke-6, 13-14 Agustus 2004, Jogjakarta.
- Wibowo, Busono. 2003. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur Periode Tahun 1987-2001*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- [HTTP ://www.d-infokom-jatim.go.id/jatim.php](http://www.d-infokom-jatim.go.id/jatim.php). Profil Jawa Timur.



**Lampiran 1**  
**Tabel Indeks Theil Jawa Timur**  
**Tahun 1997-2003**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Utara-Selatan	0.0795091	0.0679147	0.0643690	0.0751437	0.0754501	0.076047248	0.0762093
Barat	0.3260083	0.3339700	0.3275385	0.3300796	0.3308269	0.295160086	0.3001752
Daya	0.0178285	0.0149143	0.0140533	0.0146645	0.0136303	0.013539183	0.0137697
Timur	0.0178005	0.0128772	0.0144460	0.0152279	0.0189049	0.017869715	0.018129
<b>Dalam</b>							
<b>Koridor</b>	<b>0.1153639</b>	<b>0.1120665</b>	<b>0.1087678</b>	<b>0.1147107</b>	<b>0.114443</b>	<b>0.107025381</b>	<b>0.1072896</b>
<b>Kontribusi (%)</b>	<b>72.89</b>	<b>76.12</b>	<b>76.39</b>	<b>75.62</b>	<b>75.33929</b>	<b>73.77917593</b>	<b>73.466506</b>
<b>Antar</b>							
<b>Koridor</b>	<b>0.0429059</b>	<b>0.0351640</b>	<b>0.0336112</b>	<b>0.0369799</b>	<b>0.0374605</b>	<b>0.038036392</b>	<b>0.0387492</b>
<b>Kontribusi (%)</b>	<b>27.11</b>	<b>23.88</b>	<b>23.61</b>	<b>24.38</b>	<b>24.66071</b>	<b>26.22082407</b>	<b>26.533494</b>
<b>Total</b>	<b>0.1582698</b>	<b>0.1472305</b>	<b>0.1423790</b>	<b>0.1516906</b>	<b>0.1519035</b>	<b>0.145061774</b>	<b>0.1460388</b>

Sumber : Hasil Perhitungan



**Lampiran 2**  
**Tabel Indeks Herfindahl Menurut Koridor**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%
<b>Utara-Selatan</b>	0.3045545	80.91	0.2812519	78.03	0.2799727	77.90	0.280601	78.04	0.288481	79.06	0.29	79.35	0.2977517	80.23
<b>Barat</b>	0.042455	11.28	0.0471573	13.08	0.0471138	13.11	0.0463973	12.90	0.0446006	12.22	0.04	12.08	0.0423497	11.41
<b>Daya</b>	0.0165852	4.41	0.0180296	5.00	0.0179271	4.99	0.0176384	4.91	0.0179608	4.92	0.02	4.90	0.0173551	4.68
<b>Timur</b>	0.0128382	3.41	0.0139799	3.88	0.0143823	4.00	0.0149016	4.14	0.0138508	3.80	0.01	3.67	0.0136433	3.68
<b>Jawa Timur</b>	<b>0.3764329</b>	<b>100</b>	<b>0.3604187</b>	<b>100</b>	<b>0.3593959</b>	<b>100</b>	<b>0.3595383</b>	<b>100</b>	<b>0.3648931</b>	<b>100</b>	<b>0.37</b>	<b>100</b>	<b>0.3710998</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Perhitungan



**Lampiran 3**  
**Tabel Indeks Herfindahl Menurut Kabupaten/Kotamadya**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

Koridor		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		
		$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	
Utara-Selatan	Kab. Gresik	0.003264731	3.78	0.0032053407	3.87	0.003205525	4.13	0.003373197	4.34	0.003473668	4.43	0.003538083	4.51	0.003584654	4.51	
	Kab. Sidoarjo	0.007720234	8.95	0.006942731	8.80	0.00692071	8.91	0.007010052	9.03	0.007089405	9.05	0.007171181	9.15	0.007997022	10.05	
	Kab. Mojokerto	0.000355287	0.41	0.00036656	0.46	0.000383882	0.49	0.000376418	0.48	0.000392105	0.50	0.000373712	0.48	0.000373628	0.47	
	Kab. Blitar	0.000156626	0.18	0.000180785	0.23	0.000188337	0.24	0.000201079	0.26	0.00019538	0.25	0.000195113	0.25	0.00019406	0.24	
	Kab. Malang	0.001550869	1.80	0.001737776	2.20	0.001767272	2.28	0.00177895	2.29	0.001564623	2.00	0.001562515	1.99	0.001545472	1.94	
	Kab. Pasuruan	0.001882293	2.18	0.001995259	2.53	0.001998142	2.57	0.001998504	2.57	0.002054636	2.62	0.002052166	2.62	0.002060096	2.59	
	Kodya. Malang	0.001673508	1.94	0.001454957	1.84	0.001421179	1.83	0.00139041	1.79	0.00139688	1.78	0.001378345	1.76	0.00136884	1.72	
	Kodya. Pasuruan	0.000029214	0.03	0.000032433	0.04	0.000033249	0.04	0.000033582	0.04	0.00003481	0.04	0.00003481	0.04	0.00003481	0.04	
	Kodya. Blitar	0.000019316	0.02	0.00001933	0.02	0.00001936	0.02	0.00001936	0.02	0.00002025	0.03	0.00002025	0.03	0.00002025	0.03	
	Kodya. Mojokerto	0.000024402	0.03	0.000026936	0.03	0.00002704	0.03	0.000027196	0.04	0.00002916	0.04	0.00002916	0.04	0.00002916	0.04	
	Kodya. Surabaya	0.056190668	65.11	0.048122843	60.98	0.046737667	60.20	0.046884735	60.38	0.047940766	61.20	0.048764405	62.20	0.049433722	62.14	
	Kodya. Batu									0.0000961	0.01	0.00001024	0.01	0.00001024	0.01	
	Barat-Daya	Kab. Pacitan	0.000038564	0.04	0.000047334	0.06	0.00004692	0.06	0.00004761	0.06	0.00004624	0.06	0.00004624	0.06	0.00004489	0.06
		Kab. Ponorogo	0.00010811	0.13	0.000130882	0.17	0.000135532	0.17	0.00014768	0.19	0.000184423	0.24	0.000143351	0.18	0.000142379	0.18
Kab. Madiun		0.00007788	0.09	0.000084456	0.11	0.00008281	0.11	0.000079477	0.10	0.00008281	0.11	0.00008281	0.11	0.000081	0.10	
Kab. Magetan		0.00009604	0.11	0.000106317	0.13	0.000106606	0.14	0.000106938	0.14	0.000107657	0.14	0.000106961	0.14	0.000104902	0.13	
Kab. Trenggalaek		0.000041024	0.05	0.00004921	0.06	0.00005041	0.06	0.000051552	0.07	0.00005184	0.07	0.00005184	0.07	0.00005184	0.07	
Kab. Tulungagung		0.000427854	0.50	0.000431977	0.55	0.000434982	0.56	0.000467006	0.60	0.000467037	0.60	0.000619517	0.79	0.000461338	0.58	
Kab. Kediri		0.000548605	0.64	0.000579234	0.73	0.000603419	0.78	0.000622997	0.80	0.000393289	0.50	0.000616773	0.79	0.000609851	0.77	
Kab. Jombang		0.000277128	0.32	0.000299432	0.38	0.000301488	0.39	0.00029696	0.38	0.000299713	0.38	0.000299193	0.38	0.00029273	0.37	
Kab. Nganjuk		0.000175857	0.20	0.000188072	0.24	0.000187449	0.24	0.000184337	0.24	0.000182806	0.23	0.000182724	0.23	0.000181304	0.23	
Kodya. Madiun		0.000049	0.06	0.000052056	0.07	0.00005184	0.07	0.000051768	0.07	0.00005329	0.07	0.00005329	0.07	0.00005256	0.07	
Kodya. Kediri		0.006874641	7.97	0.007960404	10.09	0.007783428	10.03	0.007392576	9.52	0.007143606	9.12	0.005964566	7.61	0.005872593	7.38	
Kab. Lumajang		0.000254892	0.30	0.000264445	0.34	0.000264971	0.34	0.000261927	0.34	0.00026671	0.34	0.000262034	0.33	0.000260818	0.33	
Kab. Probolinggo		0.000436645	0.51	0.000473188	0.60	0.000464815	0.60	0.000449007	0.58	0.000449478	0.57	0.000455367	0.58	0.000374974	0.47	
Kab. Banyuwangi		0.000879428	1.02	0.000949882	1.20	0.000931755	1.20	0.000935369	1.20	0.000941833	1.20	0.000931427	1.19	0.00092217	1.16	
Kab. Jember	0.000958939	1.11	0.001070497	1.36	0.001081819	1.39	0.001091295	1.41	0.001110483	1.42	0.001127733	1.44	0.001125888	1.42		
Kab. Bondowoso	0.00009409	0.11	0.000111863	0.14	0.000111984	0.14	0.000110023	0.14	0.000114378	0.15	0.000113039	0.14	0.000110578	0.14		
Kab. Situbondo	0.000140192	0.16	0.000160527	0.20	0.000160752	0.21	0.000157663	0.20	0.000162245	0.21	0.000162141	0.21	0.000161022	0.20		
Utara	Kodya. Probolinggo	0.00009555	0.11	0.000089965	0.11	0.00008742	0.11	0.00008464	0.11	0.000081	0.10	0.00008281	0.11	0.00008281	0.10	
	Kab. Lamongan	0.000227438	0.26	0.000265782	0.34	0.000270239	0.35	0.000268138	0.35	0.000272646	0.35	0.000272502	0.35	0.000270169	0.34	
	Kab. Bojonegoro	0.000220718	0.26	0.000244422	0.31	0.00024493	0.32	0.000238782	0.31	0.000238319	0.30	0.000236819	0.30	0.000234777	0.30	
	Kab. Tuban	0.000772038	0.89	0.000844115	0.82	0.000781316	1.01	0.000770081	0.99	0.000810197	1.03	0.000808044	1.03	0.000807783	1.02	
	Kab. Ngawi	0.000120312	0.14	0.000138331	0.18	0.000139219	0.18	0.000138911	0.18	0.000140392	0.18	0.000139914	0.18	0.000138749	0.17	
	Kab. Sampang	0.000107592	0.12	0.000129224	0.16	0.000130466	0.17	0.000126022	0.16	0.000126617	0.16	0.00009801	0.13	0.000123462	0.16	
	Kab. Pamekasan	0.000070308	0.08	0.000078765	0.10	0.00007569	0.10	0.000074304	0.10	0.00007225	0.09	0.00007225	0.09	0.00007056	0.09	
	Kab. Sumenep	0.000232203	0.27	0.00030167	0.38	0.00027133	0.35	0.000273024	0.35	0.000213146	0.27	0.000211632	0.27	0.000207694	0.26	
	Kab. Bangkalan	0.000113028	0.13	0.000133767	0.17	0.000130751	0.17	0.000127311	0.16	0.000122434	0.16	0.000121104	0.15	0.000119014	0.15	
	<b>Jawa Timur</b>	<b>0.086305224</b>	<b>100</b>	<b>0.078918864</b>	<b>100</b>	<b>0.077633944</b>	<b>100</b>	<b>0.077646881</b>	<b>100</b>	<b>0.078338132</b>	<b>100</b>	<b>0.078395671</b>	<b>100</b>	<b>0.079557809</b>	<b>100</b>	

**Lampiran 4**  
**Tabel Indeks Herfindahl Kabupaten/Kota Pada Koridor Utara-Selatan**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

Koridor	Kab/Kodya	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
		$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%
Utara	Kab. Gresik	0.010720	4.48	0.010856	4.78	0.011449	5.11	0.011937	5.35	0.012041	5.41	0.012159	5.43	0.012039	5.38
Selatan	Kab. Sidoarjo	0.025349	10.59	0.024685	10.86	0.024719	11.04	0.024807	11.11	0.024575	11.04	0.024644	11.01	0.026858	12.00
	Kab. Mojokerto	0.001167	0.49	0.001303	0.57	0.001371	0.61	0.001332	0.60	0.001359	0.61	0.001297	0.58	0.001255	0.56
	Kab. Blitar	0.000514	0.21	0.000643	0.28	0.000673	0.30	0.000712	0.32	0.000677	0.30	0.000671	0.30	0.000652	0.29
	Kab. Malang	0.005092	2.13	0.006179	2.72	0.006312	2.82	0.006295	2.82	0.005424	2.44	0.005370	2.40	0.005190	2.32
	Kab. Pasuruan	0.006180	2.58	0.007094	3.12	0.007137	3.19	0.007072	3.17	0.007122	3.20	0.007052	3.15	0.006919	3.09
	Kodya. Malang	0.005495	2.30	0.005173	2.28	0.005076	2.27	0.004920	2.20	0.004842	2.18	0.004737	2.12	0.004597	2.05
	Kodya. Pasuruan	0.000096	0.04	0.000115	0.05	0.000117	0.05	0.000120	0.05	0.000121	0.05	0.000121	0.05	0.000118	0.05
	Kodya. Blitar	0.000063	0.03	0.000069	0.03	0.000070	0.03	0.000070	0.03	0.000071	0.03	0.000071	0.03	0.000069	0.03
	Kodya. Mojokerto	0.000081	0.03	0.000096	0.04	0.000098	0.04	0.000098	0.04	0.000102	0.05	0.000101	0.05	0.000099	0.04
	Kodya. Surabaya	0.184501	77.11	0.171102	75.27	0.168937	74.54	0.165918	74.31	0.166183	74.67	0.167582	74.87	0.166023	74.17
	Kodya. Batu							0.00	0.00	0.000034	0.02	0.000035	0.02	0.000035	0.02
	$\sum X_i^2$	0.239259	100	0.227316	100	0.223959	100	0.223281	100	0.222651	100	0.223839	100	0.223853	100

Sumber : Hasil Perhitungan



**Lampiran 5**  
**Tabel Indeks Herfindahl Kabupaten/Kota Pada Koridor Barat Daya**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

Koridor	Kab/Kodya	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
		$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%
Barat Daya	Kab. Pacitan	0.000913	0.44	0.000999	0.47	0.001005	0.48	0.001026	0.51	0.001053	0.52	0.001040	0.56	0.001064	0.57
	Kab. Ponorogo	0.002546	1.24	0.002775	1.32	0.002877	1.38	0.003161	1.56	0.004135	2.05	0.003237	1.76	0.003362	1.80
	Kab. Madiun	0.001846	0.90	0.001788	0.85	0.001770	0.85	0.001722	0.85	0.001848	0.91	0.001861	1.01	0.001934	1.04
	Kab. Magetan	0.002264	1.10	0.002255	1.07	0.002263	1.09	0.002289	1.13	0.002414	1.19	0.002415	1.31	0.002477	1.33
	Kab. Trenggalaek	0.000969	0.47	0.001048	0.50	0.001074	0.52	0.001106	0.55	0.001159	0.57	0.001165	0.63	0.001225	0.66
	Kab. Tulungagung	0.010078	4.91	0.009160	4.35	0.009233	4.44	0.009995	4.94	0.010472	5.18	0.013989	7.59	0.010894	5.84
	Kab. Kediri	0.012922	6.29	0.012283	5.83	0.012808	6.17	0.013333	6.59	0.008818	4.36	0.013927	7.55	0.014400	7.72
	Kab. Jombang	0.006528	3.18	0.006350	3.02	0.006399	3.08	0.006356	3.14	0.006720	3.33	0.006756	3.66	0.006912	3.71
	Kab. Nganjuk	0.004142	2.02	0.003988	1.89	0.003979	1.92	0.003945	1.95	0.004099	2.03	0.004126	2.24	0.004281	2.30
	Kodya. Madiun	0.001298	0.63	0.001111	0.53	0.001119	0.54	0.001116	0.55	0.001200	0.59	0.001206	0.65	0.001248	0.67
	Kodya. Kediri	0.161928	78.82	0.168805	80.17	0.165205	79.53	0.158217	78.22	0.160168	79.26	0.134684	73.04	0.138669	74.37
	$\Sigma X_i^2$	0.205434	100	0.210563	100	0.207732	100	0.202266	100	0.202085	100	0.184407	100	0.186466	100

Sumber : Hasil Perhitungan

**Lampiran 6**  
**Tabel Indeks Herfindahl Kabupaten/Kota Pada Koridor Timur**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

Koridor	Kab/Kodya	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
		$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%
Timur	Kab. Lumajang	0.015369	8.91	0.014667	8.48	0.014780	8.54	0.014746	8.47	0.014850	8.53	0.014578	8.36	0.015028	8.58
	Kab. Probolinggo	0.026327	15.27	0.026245	15.17	0.025928	14.97	0.025278	14.53	0.025026	14.37	0.025334	14.53	0.021606	12.34
	Kab. Banyuwangi	0.053025	30.76	0.052685	30.44	0.051975	30.02	0.052659	30.26	0.052438	30.12	0.051818	29.72	0.053135	30.35
	Kab. Jember	0.057819	33.54	0.059374	34.31	0.060345	34.85	0.061437	35.31	0.061828	35.51	0.062740	35.98	0.064873	37.06
	Kab. Bondowoso	0.005673	3.29	0.006204	3.59	0.006247	3.61	0.006194	3.56	0.006368	3.66	0.006289	3.61	0.006371	3.64
	Kab. Situbondo	0.008453	4.90	0.008904	5.14	0.008967	5.18	0.008876	5.10	0.009033	5.19	0.009020	5.17	0.009278	5.30
	Kodya. Probolinggo	0.005743	3.33	0.004979	2.88	0.004906	2.83	0.004805	2.76	0.004550	2.61	0.004584	2.63	0.004770	2.72
	$\Sigma X_i^2$	<b>0.172409</b>	<b>100</b>	<b>0.173058</b>	<b>100</b>	<b>0.173148</b>	<b>100</b>	<b>0.173996</b>	<b>100</b>	<b>0.174093</b>	<b>100</b>	<b>0.174362</b>	<b>100</b>	<b>0.175062</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Perhitungan





**Lampiran 7**  
**Tabel Indeks Herfindahl Kabupaten/Kota Pada Koridor Utara**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 1997-2003**

Koridor	Kab/Kodya	1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
		$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%	$X_i^2$	%
Utara	Kab. Lamongan	0.017716	12.21	0.019012	13.73	0.018790	13.22	0.018940	13.30	0.019685	13.66	0.020232	13.91	0.019802	13.70
	Kab. Bojonegoro	0.017192	11.84	0.017484	12.83	0.017030	11.98	0.016867	11.85	0.017206	11.94	0.017583	12.09	0.017208	11.90
	Kab. Tuban	0.060136	41.43	0.046074	33.27	0.054325	38.21	0.054395	38.21	0.058495	40.59	0.059994	41.24	0.059208	40.95
	Kab. Ngawi	0.009371	6.46	0.009895	7.15	0.009680	6.81	0.009671	6.79	0.010136	7.03	0.010388	7.14	0.010170	7.03
	Kab. Sampang	0.008381	5.77	0.009244	6.68	0.009071	6.38	0.008902	6.25	0.009141	6.34	0.007251	4.98	0.009049	6.26
	Kab. Pamekasan	0.005459	3.76	0.005611	4.05	0.005332	3.75	0.005313	3.73	0.005229	3.63	0.005325	3.66	0.005187	3.59
	Kab. Sumenep	0.018087	12.46	0.021579	15.58	0.018866	13.27	0.019285	13.55	0.015389	10.68	0.015713	10.80	0.015223	10.53
	Kab. Bangkalan	0.008804	6.07	0.009569	6.91	0.009091	6.39	0.008993	6.32	0.008839	6.13	0.008991	6.18	0.008723	6.03
	$\Sigma X_i^2$	0.145146	100	0.138467	100	0.142184	100	0.142365	100	0.144120	100	0.146478	100	0.144570	100



**Contoh 8**  
**Nilai Indeks Krugman Menurut Koridor**  
**Tahun 1997-2003**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Utara-Selatan Barat</b>	1.20746	1.12133	1.11650	1.11887	1.14842	1.15774	1.18267
<b>Daya Timur</b>	0.51582	0.49498	0.49236	0.49024	0.49659	0.49975	0.50291
<b>Utara</b>	0.51565	0.49480	0.49225	0.49011	0.49632	0.49969	0.50275
<b>Indeks rata-rata</b>	0.54678	0.52705	0.52030	0.51171	0.52924	0.53578	0.53278
<b>rata-rata</b>	<b>0.69647</b>	<b>0.65958</b>	<b>0.65538</b>	<b>0.65276</b>	<b>0.66771</b>	<b>0.67325</b>	<b>0.68032</b>

Sumber : Hasil Perhitungan



**Lampiran 9**  
**Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun**  
**Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 1997-2003**

Koridor	Kab/Kodya	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Utara-Selatan	Kab. Gresik	945290	958441	974074	1009514	1026488	1043747	1059822
	Kab. Sidoarjo	1429172	1471998	1531376	1547407	1592385	1638669	1776187
	Kab. Mojokerto	852952	862622	873121	923603	955233	954161	968502
	Kab. Blitar	1062216	1063897	1061366	1095449	1100663	1105902	1110726
	Kab. Malang	2389859	2412275	2434733	2480687	2322699	2331120	2338865
	Kab. Pasuruan	1311294	1330868	1354382	1361261	1381027	1401079	1419716
	Kodya. Malang	794366	809743	829424	750478	756294	762155	767567
	Kodya. Pasuruan	168491	171001	173981	170845	172840	174859	176730
	Kodya. Blitar	124489	125236	125765	122339	122683	123027	123335
	Kodya. Mojokerto	109754	111259	113007	109122	110100	111087	111999
	Kodya. Surabaya	2801979	2852567	2915994	2618927	2633067	2647283	2660381
Kodya. Batu					170030	173763	177256	
<b>Koridor Utara Selatan</b>		<b>11989862</b>	<b>12169907</b>	<b>12387223</b>	<b>12189632</b>	<b>12343509</b>	<b>12466852</b>	<b>12691087</b>
Barat Daya	Kab. Pacitan	512639	513860	513305	529793	532726	535674	538392
	Kab. Ponorogo	866879	870696	872417	861861	974735	866995	869359
	Kab. Madiun	649188	650953	650521	651604	653421	655243	656918
	Kab. Magetan	637178	638137	636558	622254	621738	621222	620750
	Kab. Trenggalaek	660542	665636	670209	660020	663790	667582	680005
	Kab. Tulungagung	921933	926047	927967	943575	949197	1101705	960067
	Kab. Kediri	1405657	1414123	1420277	1443613	1155700	1464954	1474840
	Kab. Jombang	1107732	1115919	1123043	1142929	1152962	1163083	1172439
	Kab. Nganjuk	981578	986344	988941	1008630	1015318	1022050	1028236
	Kodya. Madiun	173840	174280	174671	169655	169595	169536	169481
	Kodya. Kediri	267194	269696	271613	251522	251697	251872	252033
<b>Koridor Barat Daya</b>		<b>8184360</b>	<b>8225691</b>	<b>8249522</b>	<b>8285456</b>	<b>8140880</b>	<b>8519916</b>	<b>8422521</b>
Timur		0	0	0	0	0	0	0
	Kab. Lumajang	950191	953244	953281	981944	987939	993971	1002468
	Kab. Probolinggo	983143	992651	1002401	1007643	1017365	1034346	951112
	Kab. Banyuwangi	1494419	1499144	1499781	1520090	1526870	1533679	1539948
	Kab. Jember	2142749	2153276	2158995	2191893	2205492	2219175	2231793
	Kab. Bondowoso	682694	685970	687788	696578	700692	704831	708646
	Kab. Situbondo	602309	606197	609236	610008	613778	617570	621067
	Kodya. Probolinggo	195690	198500	201806	194707	196591	198493	200252
	<b>Koridor Timur</b>		<b>7051195</b>	<b>7088982</b>	<b>7113288</b>	<b>7202863</b>	<b>7248727</b>	<b>7302065</b>
	0	0	0	0	0	0	0	
Utara	Kab. Lamongan	1199421	1207046	1212846	1214101	1221528	1229000	1235890
	Kab. Bojonegoro	1167428	1176266	1184117	1186934	1195706	1204542	1212700
	Kab. Tuban	1045765	1055522	1065283	1053500	1061529	1069618	1077088
	Kab. Ngawi	816014	817614	816265	830828	833908	837072	839949
	Kab. Sampang	770195	780124	791554	801797	812612	726856	833640
	Kab. Pamekasan	688901	697929	708280	712929	722148	731487	740154
	Kab. Sumenep	979711	985941	990749	1008845	1016812	1024843	1032260
	Kab. Bangkalan	790278	795716	800093	853120	864279	875584	886077
<b>Koridor Utara</b>		<b>7457713</b>	<b>7516158</b>	<b>7569187</b>	<b>7662054</b>	<b>7728522</b>	<b>7699002</b>	<b>7857758</b>
<b>Total Jawa Timur</b>		<b>34683130</b>	<b>35000738</b>	<b>35319221</b>	<b>35340005</b>	<b>35461638</b>	<b>35987835</b>	<b>36226651</b>

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993  
Kabupaten/Kotamadya di Provinsi Jawa Timur  
Tahun 1997-2003**

Coridor	Kab/Kodya	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Utara- Jelatan	Kab. Gresik	3705592.31	3005954.69	3117478.29	3302182.77	3451410	3621552.12	3798944.57
	Kab. Sidoarjo	5698350.67	4532682.05	4580671.98	4760372.12	4930685.62	5155918.73	5674185.00
	Kab. Mojokerto	1222428.25	1041508.54	1078829.82	1103102.03	1159588.21	1182663.04	1226476.42
	Kab. Blitar	811643.30	731426.93	755651.02	806239.50	818543.91	850460.56	883909.30
	Kab. Malang	2554003.75	2267707.37	2314757.62	2398071.32	2316366.79	2406704.47	2494421.91
	Kab. Pasuruan	2813698.03	2429907.37	2461313.90	2541749.58	2654421.11	2758144.18	2879937.45
	Kodya. Malang	2653064.65	2074986.17	2075765.61	2120077.32	2188678.55	2260422.91	2347554.30
	Kodya. Pasuruan	350721.76	309940.36	315578.39	330537.51	345373.58	361617.66	375628.68
	Kodya. Blitar	284910.98	239616.48	243020.16	252008.68	264410.55	275776.03	286752.77
	Kodya. Mojokerto	322713.22	282297.34	287862.44	298440.72	317040.14	330867.51	343969.14
	Kodya. Surabaya	15373261.89	11933442.11	11903847.82	12311076.00	12821973.92	13445042.44	14107530.78
Kodya. Batu					184428.65	194290.42	203830.02	
<b>Koridor Utara Selatan</b>		<b>35790388.81</b>	<b>28849469.41</b>	<b>29134777.05</b>	<b>30223857.55</b>	<b>31452921.03</b>	<b>32843460.07</b>	<b>34623140.34</b>
Barat Jaya	Kab. Pacitan	403845.17	373386.45	378968.43	393740.00	401335.29	413266.13	426022.27
	Kab. Ponorogo	674319.80	622343.44	641025.71	690941.68	795261.37	728971.45	757115.31
	Kab. Madiun	574133.98	499565.27	502823.42	510020.34	531580.60	552660.47	574197.91
	Kab. Magetan	635805.25	560907.08	568518.05	587958.68	607608.51	629685.98	649876.70
	Kab. Trenggalaek	415886.84	382434.78	391734.28	408777.76	421067.10	437416.83	456924.38
	Kab. Tulungagung	1341472.73	1130629.43	1148389.65	1228687.73	1265545.92	1515434.93	1362853.50
	Kab. Kediri	1519020.64	1309233.03	1352581.70	1419133.11	1161337.71	1512075.17	1566935.90
	Kab. Jombang	1079628.65	941323.53	956067.44	979781.85	1013806.50	1053141.36	1085607.48
	Kab. Nganjuk	860031.00	746023.21	753867.92	771945.37	791768.04	823016.24	854364.55
	Kodya. Madiun	481442.07	393742.29	399873.21	410484.34	428432.96	444868.89	461303.89
	Kodya. Kediri	5377234.01	4853529.15	4857796.42	4888528.87	4949498.05	4702189.68	4862440.36
<b>Koridor Barat Daya</b>		<b>13362820.14</b>	<b>11813117.66</b>	<b>11951646.23</b>	<b>12289999.73</b>	<b>12367242.05</b>	<b>12812727.13</b>	<b>13057642.25</b>
Timur	Kab. Lumajang	1035409.23	884621.59	896298.84	920175.54	956360.81	985573.88	1024727.40
	Kab. Probolinggo	1355183.73	1183332.32	1187118.72	1204777.75	1241527.77	1299246.40	1228682.79
	Kab. Banyuwangi	1923242.34	1676582.84	1680755.81	1738888.34	1797170.97	1858168.75	1926836.73
	Kab. Jember	2008303.80	1779848.01	1811053.10	1878241.06	1951454.23	2044625.60	2129054.87
	Kab. Bondowoso	629089.19	575351.56	582681.20	596379.65	626288.28	647328.42	667226.00
	Kab. Situbondo	767884.69	689230.42	698122.81	713913.54	745913.64	775278.61	805160.01
	Kodya. Probolinggo	632959.65	515409.00	516376.87	525279.22	529390.69	552648.04	577290.52
	<b>Koridor Timur</b>		<b>8352072.63</b>	<b>7304375.74</b>	<b>7372407.35</b>	<b>7577655.10</b>	<b>7848106.39</b>	<b>8162869.70</b>
Utara	Kab. Lamongan	978060.37	886854.94	905166.07	931021.45	966945.5	1005067.8	1042934.8
	Kab. Bojonegoro	963502.65	850472.27	861736.46	878579.5	904027.72	936954.58	972226.09
	Kab. Tuban	1801993.28	1380612.44	1539101.64	1577787.79	1666854.74	1730725.59	1803378.01
	Kab. Ngawi	711359.53	639807.35	649685.01	665272.11	693862.75	720181.58	747402.22
	Kab. Sampang	672703.11	618389.92	628929.32	638267.75	658943.24	601688.44	705027.45
	Kab. Pamekasan	542935.57	481796.08	482180.94	493091.94	498359.93	515629.36	533755.28
	Kab. Sumenep	988252.12	944835.53	906991.12	939464.63	854949.6	885729.72	914432.22
	Kab. Bangkalan	689487.68	629165.18	629615.99	641523.26	647967.45	670022.5	692211.36
	<b>Koridor Utara</b>		<b>7348294.31</b>	<b>6431933.71</b>	<b>6603406.55</b>	<b>6965008.43</b>	<b>6891910.93</b>	<b>7065999.57</b>
<b>Total Jawa Timur</b>		<b>64853575.89</b>	<b>54398896.52</b>	<b>55062237.18</b>	<b>57056520.81</b>	<b>58560180.40</b>	<b>60885056.47</b>	<b>63451128.34</b>

Sumber: BPS Jawa Timur